

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan  
Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2022

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Muhammad Ragil Santoso  
Nomor Mahasiswa : 20313094  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2024**

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan  
Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2022

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Muhammad Ragil Santoso  
Nomor Mahasiswa : 20313094  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2024**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Penulis,





Muhammad Ragil Santoso

## **PENGESAHAN**

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di  
Indonesia Tahun 2010-2019**

Nama : Muhammad Ragil Santoso  
Nomor Mahasiswa : 20313094  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2022**

Disusun oleh : MUHAMMAD RAGIL SANTOSO

Nomor Mahasiswa : 20313094

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 14 Maret 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Prof. Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa pahan *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagaimana *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 7)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, beribu kata syukur terucap atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, atas segala berkah dan kemudahan yang mengiringi perjalanan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya serta sebagai tanda perjuangan saya dalam menggapai cita-cita yang mulia. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga semua kemudahan dan kelancaran terus menyertai perjalanan kuliah saya sampai saat ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya baik dalam keadaan suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, tiada kata terindah yang bisa penulis sampaikan kecuali ucapan puja dan puji syukur kepada Allah SWT' atas segala karunia, rahmat, dan hidayahNya. Shalawat teriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia dari jaman jahiliyah menuju ke jalan yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2022”**.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan doa dari awal hingga terselesainya tugas skripsi ini. Dalam hal ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jumingan dan Ibu Ngaenah, serta kaka-kaka saya Sulastri, M. Ngashim dan Sholihah yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan atas kemudahan dan kelancaran semua proses penyusunan skripsi ini, serta dengan setia selalu mendengar keluh kesah penulis dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan.
2. Bapak Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangkan baik waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dengan sabar telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya Ibu Mustika Noor Mifrahi SEI., MEK., Bapak Aminuddin Anwar S.E., M.Sc., dan Ibu Riska Dwi Astuti, S.Pd., M.Sc.
5. Keluarga kedua saya di Yogyakarta Bapak Sumaji dan Ibu Parningsih serta Kurnia Nuraini Rasnadanti. Pengurus Takmir Masjid Al-Muqtashidin FBE UII. Teman-teman seperjuangan saya Mifta Nabilah Fadilah, Yuni Astri Alviadi, Rizka Amalia Putri, Sekar Ayu Nindita, Ayu Dyah Chaerani, Khoirunisa', Della Sinta Rahayu, Sekar Anggraeni, Sekar Arum Setya Kamila, Alivia Rianti Putri, Rizqi Agung Laksono dan Bintang Rahmat Putra. Teman-teman KKN Unit 477 khususnya Denda Putri Ashada Genari dan Astri Nurisnaeni Anjasmoko. Teman-teman ambis Arifah Ratnasari dan Rifa Husniyah, Lu'lu' Al Khasanah, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga selalu penulis harapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk perbaikan karya penulis selanjutnya dari semua pihak. Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub.*

Yogyakarta, 17 Februari 2024

Penulis,

Muhammad Ragil Santoso

## DAFTAR ISI

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....              | iii   |
| PENGESAHAN .....                               | iv    |
| BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....    | v     |
| MOTTO .....                                    | vi    |
| PERSEMBAHAN.....                               | vii   |
| KATA PENGANTAR.....                            | viii  |
| DAFTAR ISI .....                               | xi    |
| DAFTAR TABEL.....                              | xv    |
| DAFTAR GAMBAR.....                             | xvi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                          | xvii  |
| ABSTRAK.....                                   | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                        | 1     |
| 1.1    LATAR BELAKANG.....                     | 1     |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                   | 7     |
| 1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....     | 7     |
| 1.3.1    Tujuan Penelitian .....               | 7     |
| 1.3.2    Manfaat Penelitian .....              | 8     |
| BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI..... | 10    |
| 2.1.    Kajian Pustaka .....                   | 10    |
| 2.2.    Landasan Teori.....                    | 16    |

|                                 |                                                                                                                      |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.1.                          | Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya .....                                                                   | 16 |
| 2.2.2.                          | Pengertian Pengeluaran Pemerintah .....                                                                              | 19 |
| 2.3.                            | Kerangka Pemikiran .....                                                                                             | 27 |
| 2.4.                            | Hubungan Variabel.....                                                                                               | 28 |
| 2.4.1.                          | Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                   | 28 |
| 2.4.2.                          | Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                    | 28 |
| 2.4.3.                          | Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                      | 29 |
| 2.4.4.                          | Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... | 30 |
| 2.5.                            | Hipotesis Penelitian .....                                                                                           | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN ..... |                                                                                                                      | 32 |
| 3.1.                            | Jenis dan Sumber Data.....                                                                                           | 32 |
| 3.2.                            | Definisi Operasional Variabel.....                                                                                   | 32 |
| 3.2.1.                          | Variabel Independen .....                                                                                            | 33 |
| 3.2.2.                          | Variabel Dependen.....                                                                                               | 34 |
| 3.3.                            | Metode Analisis Data .....                                                                                           | 34 |
| 3.3.1.                          | Model <i>Common Effect</i> .....                                                                                     | 36 |
| 3.3.2.                          | Model <i>Fixed Effect</i> .....                                                                                      | 37 |
| 3.3.3.                          | Model <i>Random Effect</i> .....                                                                                     | 38 |
| 3.4.                            | Pemilihan Model .....                                                                                                | 39 |

|                                           |                                                                |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.1.                                    | Uji Chow .....                                                 | 40 |
| 3.4.2.                                    | Uji Hausman.....                                               | 41 |
| 3.4.3.                                    | Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....                       | 42 |
| 3.5.                                      | Pengujian Statistik .....                                      | 43 |
| 3.5.1.                                    | Koefisien Determinasi ( <b><i>R</i><sup>2</sup></b> ).....     | 44 |
| 3.5.2.                                    | Uji Kelayakan Model (Uji F) .....                              | 44 |
| 3.5.3.                                    | Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t).....              | 46 |
| BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... |                                                                | 48 |
| 4.1.                                      | Deskripsi Data Penelitian .....                                | 48 |
| 4.2.                                      | Hasil Pengolahan Data.....                                     | 48 |
| 4.2.1.                                    | Regresi Fixed Effect Model .....                               | 51 |
| 4.2.2.                                    | Regresi Random Effect Model .....                              | 52 |
| 4.2.3.                                    | Regresi <i>Common Effect Model</i> .....                       | 53 |
| 4.3.                                      | Pemilihan Model Regresi .....                                  | 54 |
| 4.3.1.                                    | <i>Chow Test</i> .....                                         | 55 |
| 4.3.2.                                    | <i>Hausman Test</i> .....                                      | 55 |
| 4.3.3.                                    | <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) <i>Test</i> .....              | 56 |
| 4.4.                                      | Model Regresi Terbaik .....                                    | 57 |
| 4.4.1.                                    | Uji Koefisien Determinasi ( <b><i>R</i><sup>2</sup></b> )..... | 58 |
| 4.4.2.                                    | Uji simultan (Uji F).....                                      | 59 |
| 4.4.3.                                    | Uji Parsial (Uji t) .....                                      | 59 |
| 4.4.4.                                    | Interpretasi Hasil .....                                       | 61 |

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4.5. Intercept.....                                                                                                        | 62 |
| 4.5. Pembahasan.....                                                                                                         | 73 |
| 4.5.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....                   | 73 |
| 4.5.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....                    | 74 |
| 4.5.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....                      | 75 |
| 4.5.4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... | 77 |
| BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....                                                                                         | 79 |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                                                         | 79 |
| 5.2. Implikasi.....                                                                                                          | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                          | 84 |

## DAFTAR TABEL

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif.....             | 50 |
| Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model..... | 52 |
| Tabel 4. 3 Hasil Analisis Regresi Random Effect Mode..... | 53 |
| Tabel 4. 4 Hasil Analisis Common Effect Model.....        | 54 |
| Tabel 4. 5 Hasil Chow Test.....                           | 55 |
| Tabel 4. 6 Hasil Hausman Test .....                       | 56 |
| Tabel 4. 7 Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test.....       | 57 |
| Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Uji Hipotesis .....     | 58 |
| Tabel 4. 9 Cross Effect .....                             | 62 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... | 27 |
|-------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Lampiran I. Data Penelitian .....                 | 90  |
| Lampiran II. Uji <i>Common Effect Model</i> ..... | 102 |
| Lampiran III. Uji <i>Fixed Effect Model</i> ..... | 103 |
| Lampiran IV. Uji <i>Random Effect Model</i> ..... | 104 |
| Lampiran V. Uji <i>Chow</i> .....                 | 105 |
| Lampiran VI. Uji <i>LM Test</i> .....             | 106 |
| Lampiran VII. Uji <i>Hausman Test</i> .....       | 107 |

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan di Indonesia tahun 2010-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang sudah tersedia dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel independennya yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel (*pooled data*) dengan regresi *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022, variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022, variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022, dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022. Sedangkan berdasarkan uji F, variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2010-2022.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah di Bidang: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Perumahan dan Fasilitas Umum.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik secara kolektif dan terus-menerus (Fadilah et al., 2018). Menurut (Todaro dan Smith, 2011), pembangunan adalah proses multifaset yang memerlukan modifikasi dan perubahan pada struktur sosial dan ekonomi saat ini secara keseluruhan. Di masa lalu, pembangunan ekonomi menentukan keberhasilan suatu wilayah hanya dari tingkat pertumbuhannya, mengabaikan faktor-faktor lain seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan lain-lain. Hanya salah satu input-di samping faktor produksi lain seperti tanah, modal, dan teknologi-yang dipertimbangkan dalam hal sumber daya manusia (Mongan, 2019).

Paradigma pembangunan ekonomi telah mengalami setidaknya tiga kali perubahan, menurut (Nanga, 2000). Paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan merupakan perubahan pertama. Menurut paradigma ini, ukuran utama keberhasilan pembangunan adalah produk domestik bruto, yang juga dikenal sebagai produk nasional bruto. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dianggap sebagai masalah sekunder. Perkembangan paradigma ini dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an. Paradigma pembangunan yang mengutamakan pemerataan berada di urutan kedua. Menurut paradigma ini, mengurangi kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan merupakan tujuan utama dan komponen penting dalam rencana atau kebijakan pembangunan. Namun karena cenderung melihat masyarakat sebagai objek dalam strategi bantuan dan amal, paradigma ini mendapat banyak kritik. Ketiga, masyarakat adalah subjek dan

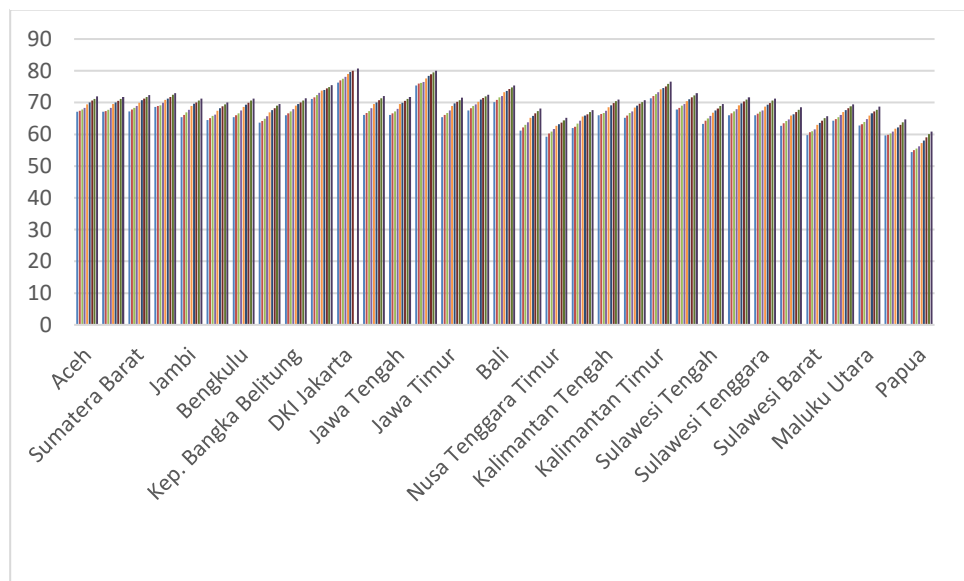
objek utama pembangunan menurut paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Menurut paradigma ini, proses peningkatan pilihan masyarakat melibatkan perluasan keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan rasa memiliki. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk mewujudkan potensi dan cita-cita mereka, seperti harga diri, kemandirian, martabat, pemberdayaan, dan lain sebagainya.

Pembangunan manusia merupakan indikator yang mencerminkan kesejahteraan suatu negara karena manusia merupakan faktor utama dan target pembangunan suatu negara (UNDP, 1990). Pendekatan pembangunan manusia berfokus pada manusia sebagai agen pembangunan (Fukuda-Parr, 2003) karena sumber daya manusia memainkan peran sentral yang menentukan kesejahteraan nasional (Manuelli, 2015). Pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan ekonomi dalam konteks sempit yang hanya menasar pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan manusia lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup dan kebebasan masyarakat (Sen, 1999).

Pada tahun 1990, konsep pengukuran pembangunan manusia diperkenalkan oleh UNDP melalui *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan disajikan secara teratur dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyajikan suatu pengukuran yang menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan manusia. Dimensi tersebut mencakup aspek kesehatan, yang diukur melalui angka harapan hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*); pendidikan, yang diukur melalui tingkat melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (*mean years schooling*); serta standar hidup layak, yang diukur melalui kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) (UNDP, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai aspek lain dari pembangunan. IPM memiliki manfaat sebagai indikator krusial dalam menilai keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia (baik dalam masyarakat maupun penduduk). Selain itu, IPM memiliki peran dalam menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah atau negara (BPS, 2015).

**Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2022 (Persen)**



Sumber: BPS 2010-2022 (Diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Indeks pembangunan manusia lebih dari 50% di masing-masing dari 33 provinsi, yang mengindikasikan bahwa kualitasnya sedang hingga menengah. Terlihat juga bahwa indeks pembangunan manusia di setiap provinsi meningkat setiap tahunnya. Masalahnya, masing-masing dari 33 provinsi ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda. Setiap daerah dapat dikatakan memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi, meskipun memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda.

Tingginya jumlah tahun sekolah yang termasuk dalam kategori pendidikan dapat berdampak pada tingginya IPM di setiap wilayah. Melalui peningkatan sikap, pemahaman, kemampuan, dan kreativitas, pendidikan memberikan kontribusi yang substansial terhadap pembangunan sosial ekonomi dengan memungkinkan terciptanya keterampilan kerja yang berkualitas tinggi. Pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rumah tangga atau pengeluaran per kapita juga dapat berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, selain durasi pendidikan. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita. Dapat dikatakan bahwa daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak tinggi ketika pengeluaran per kapita naik (Kusumaningrum, 2018).

(Ritonga, 2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan inisiatif untuk melayani masyarakat di berbagai domain layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan area lainnya, untuk memenuhi tujuan negara. Alokasi anggaran pemerintah untuk empat kategori pengeluaran, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta perumahan dan fasilitas umum, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar dan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah, menurut (Mangkoesoebroto, 2016), merupakan cerminan dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah membebankan biaya yang harus ditanggung ketika memberlakukan kebijakan tertentu. Biaya-biaya ini ditutupi oleh alokasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah, yang merupakan sumber pendanaan. Pengalokasian anggaran pada suatu sektor mencerminkan tekad pemerintah terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sektor tersebut. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pemerintah pusat secara tahunan menetapkan Undang-Undang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai wujud hak dan komitmen pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan. Sementara itu, tiap tahun pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang diterapkan di wilayah masing-masing. Proses ini sejalan dengan Semangat otonomi daerah, yang telah diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti oleh proses ini. Alat utama pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah APBN dan APBD (Mongan, 2019).

Berbagai peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diamandemen pada tahun 2009, menyatakan dalam Pasal 31 ayat 4 bahwa negara harus menyisihkan minimal dua puluh persen dari anggaran negara dan daerah untuk pendidikan nasional. Pasal 49 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana dana pendidikan dialokasikan. Menurut UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 171, alokasi belanja untuk sektor kesehatan, belanja di sektor kesehatan adalah wajib dan harus diselesaikan. Pasal tersebut menetapkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan setidaknya lima persen dari APBN untuk kesehatan, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengalokasikan setidaknya sepuluh persen dari APBD untuk kesehatan. Alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan yang diatur dalam peraturan tersebut idealnya tidak mencakup pembayaran gaji untuk aparatur sipil negara yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan (Mongan, 2019).

Terdapat dua aliran pemikiran mengenai bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi IPM sebagai hasil dari berbagai analisis teoritis yang telah dilakukan terkait hal ini. Menurut (Craigwell, Bynoe, dan Lowe, 2012), pendapat pertama menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan IPM memiliki hubungan yang positif; (Razmi, Abbasian, & Mohammadi, 2012); (Safitri, 2016) yang menyatakan bahwa anggaran yang lebih tinggi untuk pelayanan kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Sementara itu, (Astri dkk, 2013); (Wijayanto, Khusaini, & Syafitri, 2015) dan (Sanggalorang, Rumat & Siwu, 2015) menemukan bahwa anggaran yang lebih tinggi untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Demikian pula, (Fattah & Muji, 2012) dan (Edeme, 2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara signifikan mempengaruhi IPM. Keyakinan kedua melihat tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap IPM, seperti studi yang dilakukan oleh (Prasetyo & Zuhdi, 2013) mengenai efisiensi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, transfer dan subsidi yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu efisien dalam meningkatkan pembangunan manusia. Selain itu, (Badrudin & Khasanah, 2011) mengungkapkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Yogyakarta, namun sektor pendidikan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap keberhasilan pembangunan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010-2022?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010-2022?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2022?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan perumahan dan fasilitas umum di Indonesia tahun 2010-2022. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010-2022.

3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang perekonomian terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010-2022.
4. Untuk menganalisis Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2022.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru di bidang ekonomi, sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Selain itu, penulis juga berharap agar penulis dapat berpikir kritis dalam melakukan analisis, khususnya di bidang ekonomi, dan memahami tantangan yang dihadapi.

#### **2. Masyarakat Akademis**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu memberikan informasi serta gambaran pengaruh pengeluaran pemerintah berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan perumahan dan fasilitas umum untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi yang ada di Indonesia.

#### **3. Pemerintah terkait (*Stakeholder*)**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan,

perekonomian, dan perumahan dan fasilitas umum untuk meningkatkan IPM di provinsi yang ada di Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu. Kesamaan variabel dependen dan independen, tujuan penelitian, teknik analisis, dan temuan penelitian yang akan digunakan sebagai referensi penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan dalam memilih penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widodo et al., 2012) mengenai dampak pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah menunjukkan temuan yang penting. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengalokasian dana pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan fokus pada pembangunan manusia secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Fokus pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk memajukan pembangunan manusia melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi. Temuan ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, dengan memperhatikan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam studinya mengenai Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Badrudin & Khasanah, 2011) menemukan bahwa: 1) Pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sektor pendidikan tidak secara signifikan mempengaruhi pembangunan manusia dari waktu ke waktu, seperti yang diamati dari waktu ke

waktu dengan menggunakan time log dua dan tiga tahun; 2) Variabel pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia dari waktu ke waktu, seperti yang diamati dengan menggunakan data runtun waktu selama dua dan tiga tahun; dan 3) Variabel pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sektor infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia dari waktu ke waktu, seperti yang diamati dengan menggunakan data runtun waktu selama dua dan tiga tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astri et al., 2013) menyoroti pentingnya pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor-sektor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM. Fokus penelitian ini adalah pada peran pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pengeluaran yang memadai dan efektif dalam sektor-sektor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan IPM di tingkat daerah. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang penting bagi pembuat kebijakan daerah dalam merancang alokasi anggaran yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Laisina et al., 2015) merupakan upaya untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara selama periode 2002-2013. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sementara

pengeluaran di sektor kesehatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM bersifat positif, menandakan bahwa peningkatan investasi di sektor pendidikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM, yang mungkin menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara pengeluaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengeluaran pemerintah di berbagai sektor untuk meningkatkan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dan daerah sejenisnya.

Studi yang dilakukan oleh (Kahang et al., 2016) bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang terdiri dari informasi yang dapat diakses oleh instansi pemerintah selama periode studi 2009-2014. Temuan utama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa IPM di Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh sektor belanja pendidikan. Di sisi lain, sektor belanja kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun sektor belanja pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan IPM, namun hal yang sama tidak terjadi pada sektor belanja kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya pertumbuhan dan alokasi dana yang tepat dalam sektor kesehatan sebagai langkah yang krusial dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Kutai Timur,

serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan manusia yang efektif dan inklusif.

Studi yang dilakukan oleh (Fattah dan Muji, 2012) serta (Edeme, 2014) menyoroti dampak pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam ketiga sektor tersebut secara signifikan mempengaruhi IPM. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur bagi masyarakat. Hal ini penting karena meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor tersebut dapat secara positif memengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang tercermin melalui peningkatan IPM. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang penting bagi kebijakan publik dan pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran pemerintah dalam pembangunan manusia.

Studi yang dilakukan oleh (Badrudin & Khasanah, 2011) mengungkapkan temuan menarik terkait pengaruh sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pembangunan manusia di provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara keseluruhan terhadap pembangunan manusia di provinsi tersebut, namun sektor pendidikan menonjol dengan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada sektor-sektor lainnya terhadap keberhasilan pembangunan manusia. Temuan ini menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan manusia secara umum di provinsi Yogyakarta. Hal ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian yang lebih

besar terhadap sektor pendidikan dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Azwardi, 2014) berjudul "Analisis Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Serta Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2010-2013" menganalisis dampak pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia terhadap penduduk miskin dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variabel yang berpengaruh positif dan variabel yang berpengaruh negatif terhadap kondisi penduduk miskin. Variabel pengeluaran ekonomi dan pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sementara variabel pengeluaran pendidikan dan pengeluaran perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh negatif. Temuan ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran pemerintah provinsi yang tepat guna dalam memprioritaskan pengeluaran pada sektor ekonomi dan kesehatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, perlu juga perhatian terhadap dampak pengeluaran pada sektor pendidikan dan perumahan serta fasilitas umum agar tidak memberikan kontribusi negatif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat provinsi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2019) menginvestigasi pengaruh anggaran belanja pemerintah dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel anggaran pemerintah untuk pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran untuk sektor

kesehatan berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dalam peningkatan IPM. Di sisi lain, variabel anggaran pemerintah untuk pendidikan juga memiliki pengaruh positif terhadap IPM, namun tidak secara signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sifat pembiayaan dalam pendidikan yang bersifat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan IPM mungkin terlihat secara bertahap. Temuan ini memberikan pemahaman yang penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang alokasi anggaran yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyansyah, 2018) dalam analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia menunjukkan temuan yang penting. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah di sektor ekonomi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap PDRB perkapita di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi belanja pemerintah daerah yang terfokus pada sektor ekonomi mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang tercermin dalam peningkatan PDRB perkapita. Namun, temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung terhadap IPM. Dampak positif terhadap PDRB perkapita tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan IPM, menggarisbawahi pentingnya pertimbangan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi IPM di luar pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hubungan antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fajar, M. A., & Indrawati, L., 2020) mengenai pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja perumahan dan fasilitas umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cianjur mencatat temuan yang signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap IPM di Kabupaten Cianjur. Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor lain yang mungkin turut berkontribusi terhadap IPM, sehingga dampak dari alokasi pengeluaran pemerintah terhadap perumahan dan fasilitas umum mungkin memiliki pembatasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks dalam analisis pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia di tingkat daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap dinamika pembangunan manusia di tingkat lokal dan menyoroti pentingnya peran faktor-faktor lain dalam upaya meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya**

UNDP (*United Nation Development Programme*) Pengembangan manusia didefinisikan sebagai proses yang mencoba memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat umum. Pengguna dipandang sebagai tujuan akhir dalam konsep ini, sementara proses pembangunan dipandang sebagai sarana (atau sarana utama) untuk mencapai tujuan tersebut. Empat faktor kunci yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan manusia tercapai adalah produktivitas, ketekunan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). *Produktivitas*, Individu harus diberikan alat yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih produktif

dan sepenuhnya terlibat dalam proses yang menghasilkan pendapatan dan menyediakan mata pencaharian. Oleh karena itu, salah satu bagian dari model pembangunan manusia adalah pembangunan ekonomi. *pemerataan*, setiap orang harus dapat mengakses semua sumber daya sosial dan ekonomi secara setara. Agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang dan terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, semua hambatan yang menghalangi akses harus dihilangkan. *Kesinambungan*, Kita perlu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, bukan hanya generasi berikutnya. Setiap sumber daya-alam, manusia, dan fisik-dapat diperbaharui. *Pemberdayaan* mengharuskan individu untuk mengambil peran aktif dalam pilihan dan prosedur yang akan membentuk kehidupan mereka serta terlibat dan mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan.

Kekayaan negara yang sesungguhnya terletak pada rakyatnya. Pembangunan manusia memandang manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan sekadar alat (Pratama, 2018). Tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang untuk hidup sehat dan panjang umur serta menjadi anggota masyarakat yang produktif (UNDP, 1995).

Dengan memodifikasi pengeluaran per kapita dan menghitung Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) maksimum 85 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 18 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebuah wilayah menunjukkan kapasitasnya untuk mencapai persentase yang telah ditetapkan. Jika nilai IPM suatu daerah hampir mencapai 100%, maka

daerah tersebut dianggap memiliki status IPM yang sangat tinggi dan dapat memenuhi tujuan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mendukung perekonomian daerah.

#### **A. Metode Baru Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Komponen**

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dimensi pengeluaran, kesehatan, dan pendidikan adalah tiga komponen yang digunakan untuk menentukan indeks pembangunan manusia.

Menghitung IPM, IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{Kesehatan \times Pendidikan \times Pengeluaran}$$

Menghitung indeks komponen, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi pengeluaran.

$$i_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \min}{AHH \max - AHH \min}$$

$$i_{Pendidikan} = \frac{AHH - AHH \min}{AHH \max - AHH \min}$$

$$i_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan \min)}{\ln(pendapatan \max) - \ln(pendapatan \min)}$$

### 2.2.2. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Teori Pengeluaran Pemerintah menurut (Sadono Sukirno, 2000) menguraikan bagaimana pengeluaran pemerintah merupakan komponen dari kebijakan fiskal, yaitu proses di mana pemerintah mengendalikan arah perekonomian dengan memutuskan berapa banyak uang yang dibutuhkan setiap tahun dan bagaimana membelanjakannya. Informasi ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan kesempatan kerja, tingkat output, dan harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### B. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave

Ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tahap pembangunan ekonomi, menurut perspektif W.W. Rostow dan Musgrave. Pembangunan ekonomi tahap awal ditandai dengan rasio pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi terhadap pendapatan nasional, atau dengan kata lain, investasi pemerintah yang besar terhadap total investasi. Hal ini disebabkan oleh kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pada tahap awal ini.

Agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat selama tahap menengah pembangunan, investasi publik masih diperlukan. Selain itu, porsi sektor swasta juga meningkat secara bersamaan. Karena banyaknya kegagalan pasar yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi itu sendiri, peran pemerintah masih cukup signifikan pada tahap ini. Pencemaran lingkungan adalah salah satu

dari banyak contoh eksternalitas negatif yang membutuhkan tindakan pemerintah.

Musgrave menyatakan bahwa meskipun porsi investasi pemerintah dalam pendapatan nasional menurun, porsi investasi total meningkat selama proses pembangunan. Sementara itu, Rostow berpendapat bahwa pada tahap pembangunan yang lebih maju, pengeluaran pemerintah untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan telah menggantikan penyediaan infrastruktur ekonomi. Sama halnya dengan Wagner, Rostow dan Musgrave mendapatkan kesimpulan mereka dari pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di berbagai negara.

### **C. Pandangan Keynes**

(Dumairy, 1996). Perspektif Keynesian tentang perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian mendapatkan legitimasinya dari identitas keseimbangan pendapatan nasional. Keynes menegaskan bahwa berbagai faktor mempengaruhi keputusan yang dibuat ketika mengendalikan pengeluaran. Pemerintah harus mempertimbangkan target-target antara yang akan mendapatkan manfaat atau terkena dampak dari kebijakan tersebut, selain memastikan bahwa setiap kebijakan pengeluaran mencapai tujuan akhirnya. Meningkatkan pendapatan nasional atau menciptakan lebih banyak lapangan kerja membutuhkan lebih dari sekadar meningkatkan pengeluaran. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesempatan kerja, kita juga perlu mempertimbangkan siapa yang akan dipekerjakan dan pendapatannya akan meningkat. Selain itu, untuk melindungi operasi sektor swasta, pemerintah harus

menahan diri untuk tidak memperluas pengaruhnya dalam perekonomian.

Sejak mereka memahami peran penting yang dimainkan oleh pengeluaran pemerintah dalam perekonomian suatu negara, baik negara berpendapatan tinggi maupun rendah, para ekonom publik telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

#### **D. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan**

Menurut UU No. 27 Tahun 2014, pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, yang dikenal sebagai anggaran pendidikan, merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasal 31 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan setidaknya sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut catatan sejarah, pemerintah baru mulai menerapkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2010. Persentase yang signifikan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan suatu negara. Meskipun persentase anggaran pendidikan dalam APBN telah ditetapkan pada 20% sejak

tahun 2010, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan ketentuan ini.

(Wahid, 2012) Mengingat pentingnya pendanaan untuk pendidikan, pemerintah harus dapat membangun infrastruktur dan program-program yang terbaik. Salah satu cara praktis yang dapat dilakukan pemerintah untuk menginvestasikan dana untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui belanja pendidikan. Distribusi pengeluaran pembangunan di bidang pembangunan dapat difokuskan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan ditunjukkan dengan alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan berdampak pada pembangunan sektor ini, khususnya dengan meningkatkan proporsi siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, menurut (Winarti, 2014). Semakin tinggi tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, maka semakin mudah bagi angkatan kerja untuk memahami, memanfaatkan, dan mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi negara. Untuk mencapai pembangunan, sebuah negara harus berinvestasi lebih banyak di bidang kesehatan dan pendidikan."

### **E. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan**

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merujuk pada alokasi dana yang secara khusus dialokasikan untuk keperluan di bidang kesehatan. Dana ini digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya di sektor kesehatan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan meliputi penyediaan layanan publik. Layanan publik kesehatan ini harus tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata, dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka secara maksimal.

Secara umum, negara-negara berkembang seringkali memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli layanan kesehatan yang umumnya disediakan oleh sektor swasta. Dalam konteks ini, fasilitas kesehatan menjadi salah satu bentuk barang publik yang tidak akan tersedia jika dikelola oleh pihak swasta. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakatnya.

(Kuncoro, 2013) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, pemerintah mengeluarkan dana untuk sektor kesehatan sebagai upaya untuk melindungi salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (Astri, 2013) menegaskan bahwa "kualitas manusia ditentukan oleh sektor kesehatan, dimana

kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi umur panjang manusia, dengan kata lain aspek kesehatan juga mempengaruhi kualitas manusia". Gizi yang rendah, asupan kalori yang rendah, atau kesehatan penduduk yang buruk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan tingkat mental yang lebih rendah. Menurut (Todaro & Smith, 2003) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran untuk sektor kesehatan untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan layanan kesehatan. (Rumate, 2015) Otoritas UU No. 36 tahun 2009, yang mengatur pengeluaran anggaran kesehatan di Indonesia, menetapkan bahwa, setelah gaji, jumlah yang dialokasikan untuk pemerintah federal untuk pengeluaran kesehatan tidak boleh melebihi 5% dari anggaran nasional, dan jumlah yang dialokasikan untuk pemerintah daerah, provinsi, dan distrik untuk pengeluaran kesehatan tidak boleh melebihi 10% dari anggaran daerah.

#### **F. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi adalah pengeluaran pemerintah yang berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan infrastruktur umum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk memberikan dampak yang langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta menciptakan efek pengganda yang positif (Azwardi, 2014).

Peran pemerintah dalam struktur ekonomi suatu negara merupakan topik yang terus menjadi subjek perdebatan dan belum

mencapai kesepakatan. Kaum kapitalis yang dipimpin oleh Adam Smith, tokoh ekonomi klasik, berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi sebaiknya minimal. Mereka meyakini bahwa ekonomi akan mencapai keseimbangan tanpa intervensi pemerintah dan akan terus berkembang dengan cepat. Di sisi lain, ekonom sosialis, seperti Karl Marx, menentang pandangan tersebut. Marx, dengan gagasannya tentang alienasi dalam kapitalisme, memicu gelombang revolusi ekonomi di seluruh dunia. Pandangan kapitalis kemudian mengalami tantangan yang signifikan selama masa Depresi Besar pada tahun 1930-an. Munculnya depresi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya kelemahan fundamental dalam model ekonomi kapitalis, terutama dengan meningkatnya tingkat pengangguran di negara-negara Barat. Sebagai respons, seorang ekonom bernama John Maynard Keynes muncul sebagai penyelamat bagi kapitalisme. Keynes, seorang profesor dari Universitas Cambridge, mengembangkan teori "ekonomi baru" yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah. Berbeda dengan pandangan Karl Marx yang mendukung intervensi pemerintah secara mutlak, Keynes mengusulkan gagasan tentang intervensi pemerintah dalam hal fiskal untuk mengatur keseimbangan ekonomi pasar daripada mengendalikannya secara total. Salah satu bentuk intervensi atau peran pemerintah yang diusulkan oleh Keynes adalah melalui pengeluaran pemerintah, yang merupakan bagian dari total pendapatan nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan berfungsi sebagai pengendali aktivitas ekonomi (Arfiyansyah, 2018).

## **G. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum**

Menurut (Prasetyo, 2017), pengeluaran untuk belanja perumahan dan fasilitas umum mencakup penyediaan layanan di sektor perumahan dan fasilitas umum, yang memiliki dampak dominan dalam pembangunan ekonomi. Upaya penyediaan layanan tersebut akan mencerminkan sejauh mana pembangunan secara merata terjadi. Belanja perumahan dan fasilitas umum merupakan alokasi anggaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap tempat tinggal yang layak, serta untuk meningkatkan akses terhadap layanan umum seperti listrik, air minum, transportasi, irigasi, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi yang memadai dan berkelanjutan.

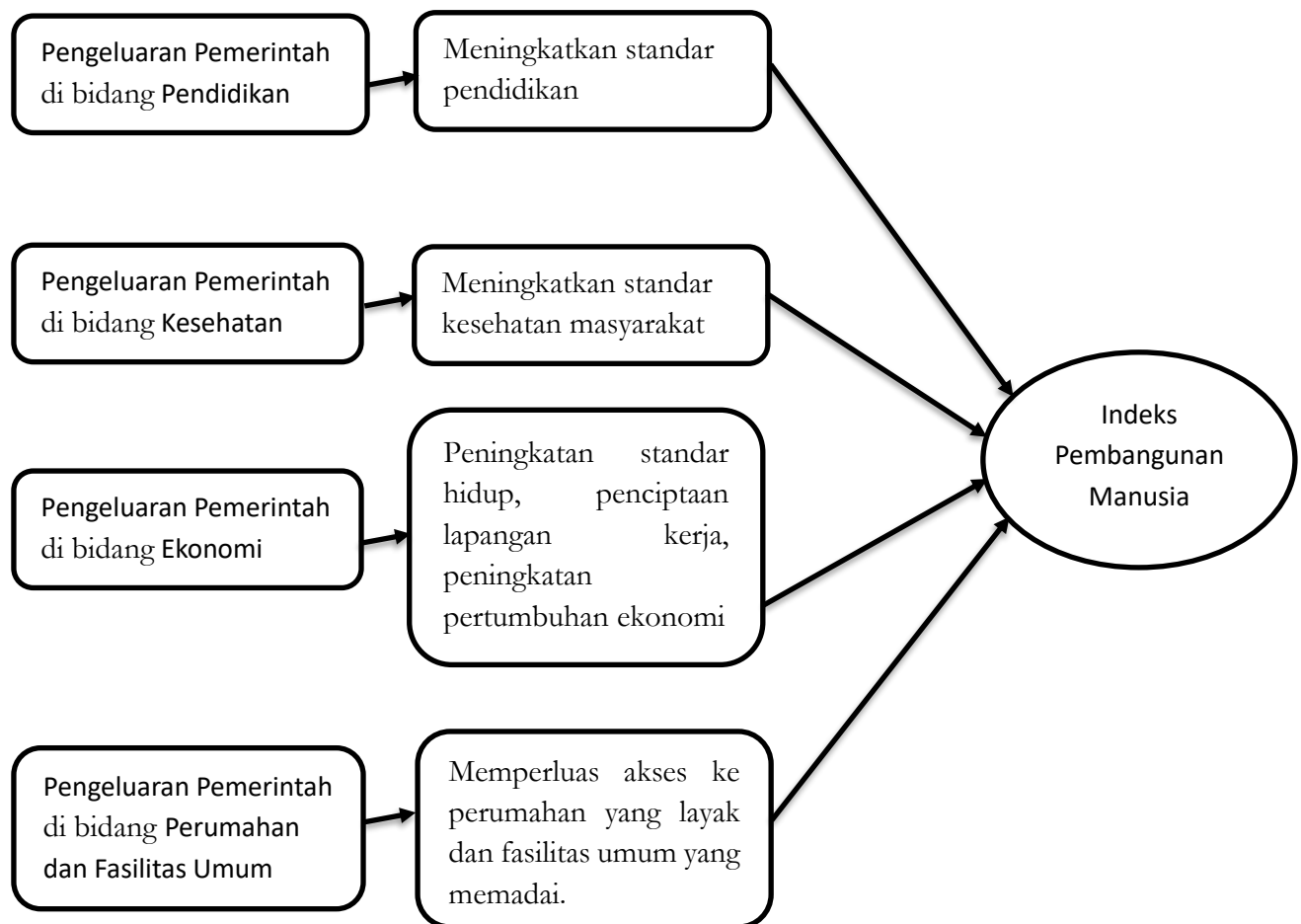
Manfaat dari pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dapat menikmati tempat tinggal yang layak, sementara fasilitas umum memengaruhi aktivitas produksi dan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

Menurut (Bappenas, 2003), tujuan dan manfaat dari pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum mencakup ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, dan lainnya. Infrastruktur tersebut dikenal sebagai modal sosial overhead yang memiliki hubungan yang erat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang tercermin dalam pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa daerah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik memiliki pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi daripada daerah yang memiliki infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dianggap sebagai faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori maka kerangka pemikiran yang dapat penulis susun adalah sebagai berikut.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## **2.4. Hubungan Variabel**

### **2.4.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Salah satu kebutuhan mendasar, yang pemenuhannya menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang, adalah pendidikan. Salah satu tujuan dari arahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan salah satu tujuannya adalah pendidikan yang merata. Pada kenyataannya, kegiatan pendidikan dibiayai oleh pengeluaran pemerintah.

Seperti diketahui, pendidikan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diperkirakan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk pendidikan akan meningkatkan standar pendidikan di suatu negara. Peningkatan dalam pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, ada peningkatan dalam tingkat kehadiran rata-rata dan tingkat melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah akan meningkat secara tidak langsung jika pengeluaran pemerintah untuk pendidikan meningkat.

### **2.4.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Penyediaan barang publik oleh pemerintah merupakan salah satu fungsinya dalam pembangunan. Infrastruktur yang sektor swasta ragu-ragu untuk menyediakannya pada tingkat yang lebih tinggi dikenal sebagai barang publik. Infrastruktur disediakan oleh pemerintah melalui pengeluaran, yang sebagian didanai oleh pajak.

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan digunakan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur medis untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat, yang menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas medis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian ibu, dan lain-lain, merupakan indikator peningkatan standar kesehatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesehatan masyarakat.

#### **2.4.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi termasuk pengeluaran untuk infrastruktur, industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Diharapkan bahwa investasi-investasi ini akan mempercepat ekspansi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang mana keduanya akan meningkatkan standar hidup.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi dapat berdampak langsung pada IPM melalui peningkatan standar hidup dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pengeluaran ini juga dapat berdampak tidak langsung melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

#### **2.4.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengeluaran Pemerintah untuk Fasilitas Umum dan Perumahan, Ini termasuk pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan infrastruktur publik, termasuk jalan dan jembatan. Diharapkan bahwa investasi-investasi ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas akses ke perumahan yang layak dan fasilitas umum yang memadai.

Pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan infrastruktur publik dapat secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi IPM. Indeks pembangunan manusia meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan fasilitas umum.

### **2.5. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut, dan didasarkan pada beberapa teori yang telah diuraikan.

- a. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik.
- b. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik.
- c. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya,

apabila pengeluaran pemerintah bidang perekonomian naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik.

- d. Pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data-data numerik yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran objek. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah disebarkan secara luas dan dikumpulkan dari sumber eksternal.

Data panel, yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section* digunakan dalam penelitian ini. Data runtun waktu selama tiga belas tahun (2010-2022) dan tiga puluh tiga titik data silang (seluruh 33 provinsi di Indonesia) disertakan. BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), publikasi berkala BPS, dan situs web pemerintah daerah merupakan beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Pada tahun penelitian ini dilakukan (2023), jumlah provinsi di Indonesia telah mengalami pertambahan yang awalnya berjumlah 33 provinsi menjadi 38 provinsi. Namun penulis hanya menggunakan data 33 provinsi dikarenakan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang baru dibentuk pada tahun 2022 belum memiliki data yang lengkap. Maka dari itu jumlah data *cross section* dalam penelitian ini hanya berjumlah 33 provinsi.

#### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam bagian ini. Baik variabel independen dan dependen.

### **3.2.1. Variabel Independen**

Variabel independen merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan dapat dimanipulasi sesuai keinginan. Variabel independen sering kali disebut sebagai variabel independen. Dalam konteks penelitian ini, variabel independen yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **A. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan (PEND)**

Anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 33 provinsi di Indonesia. Data yang diamati mencakup periode tahun 2010 hingga 2022, dengan nilai yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **B. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan (KES)**

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur kesehatan masyarakat dari 33 provinsi di Indonesia dikenal sebagai pengeluaran pemerintah provinsi dalam bidang kesehatan. Data yang terkumpul meliputi rentang waktu tahun 2010 hingga 2022, dengan satuan nilai dalam rupiah.

#### **C. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi (EKO)**

Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari 33 provinsi di Indonesia dikenal sebagai pengeluaran pemerintah provinsi dalam

bidang perekonomian. Data yang terkumpul mencakup periode tahun 2010 hingga 2022, dengan nilai yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **D. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum (PFU)**

Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum bagi masyarakat dari 33 provinsi di Indonesia merupakan pengeluaran pemerintah provinsi dalam sektor tersebut. Data yang terkumpul merangkum periode tahun 2010 hingga 2022, dengan nilai yang diukur dalam mata uang rupiah.

#### **3.2.2. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang mengalami perubahan sebagai hasil dari perubahan variabel independen. Dalam penelitian ini, satu-satunya variabel dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 1,00 hingga 100,00. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik keberhasilan pembangunan tersebut. Poin indeks merupakan satuan pengukuran untuk IPM.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kausalitas, yang membedakan dua jenis variabel: variabel dependen

(variabel yang terpengaruh) dan variabel independen (variabel yang tidak terpengaruh). Penggunaan tipe data panel memungkinkan penggunaan metode regresi data panel yang unik dalam ekonometrika untuk mengolah data. Karena adanya penyertaan dua jenis informasi secara simultan, informasi antar objek yang diwakili oleh data *cross section* dan informasi antar waktu yang diwakili oleh data *time series*. Regresi data panel sedikit berbeda dengan regresi data biasa.

Menurut (Gujarati, 2015), data panel memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section*. Berikut adalah beberapa keunggulan tersebut.

- a. Data panel memberikan sejumlah keunggulan, seperti peningkatan jumlah informasi, variasi yang lebih bervariasi, tingkat kolinieritas yang lebih rendah, dan peningkatan derajat kebebasan. Keuntungan-keuntungan ini timbul karena data panel menggabungkan elemen dari *time series* dan *cross section*.
- b. Menyusun pengukuran interaksi antar variabel dengan lebih sederhana dan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan data *cross section* atau *time series* secara terpisah.
- c. Memfasilitasi penelitian terhadap model perilaku yang kompleks.
- d. Jumlah data yang lebih besar bisa mengurangi kemungkinan adanya bias.

Menurut (Sriyana, 2014), hasil analisis regresi data panel menghasilkan tiga potensi model regresi yang dapat dimanfaatkan, yakni:

- a. Metode *common effect* (diasumsikan bahwa intersep dan kemiringan tetap konsisten antara individu dan waktu).
- b. Metode *fixed effect* (Diasumsikan bahwa kemiringan tetap konstan, namun intersepnya bervariasi antara individu).
- c. Metode *random effect* (Diasumsikan bahwa kemiringan tetap, tetapi intersepnya bervariasi antara objek dan waktu).

Terdapat tiga model potensial untuk estimasi data panel, dan langkah berikutnya adalah melakukan tes untuk menentukan model yang paling cocok. Metode dan cara pengujian ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### 3.3.1. Model *Common Effect*

Model *common effect* adalah model yang paling sederhana di antara tiga model yang dihasilkan dari analisis regresi data panel. Asumsi utamanya adalah bahwa slope dan intersep selalu konstan baik antar individu maupun antar waktu (Sriyana, 2014). Pendekatan sistematis dari model *common effect* ini melibatkan penggabungan data *time series* dan *cross section* ke dalam satu *pool* data, kemudian melakukan regresi dengan menggunakan metode OLS. Bentuk umum dari persamaan model *common effect* adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PENDING_{1it} + \beta_2 \ln KES_{2it} + \beta_3 \ln EKO_{3it} + \beta_4 \ln PFU_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan

|                                      |   |                                                               |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| $Y_{it}$                             | : | Indeks Pembangunan Manusia                                    |
| $\beta_0$                            | : | Konstanta                                                     |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ | : | Koefisien <i>PENDING, KES, EKO, PFU</i>                       |
| $\ln PENDING_{1it}$                  | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (rupiah) |
| $\ln KES_{2it}$                      | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (rupiah)  |

|                    |   |                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\ln EKO_{3it}$    | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perekonomian (rupiah)                 |
| $\ln PFU_{4it}$    | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum (rupiah) |
| $\varepsilon_{it}$ | : | Variabel gangguan ( <i>error</i> )                                              |

Masalah yang sering muncul pada model ini adalah bahwa meskipun *R-squared* memiliki nilai tinggi, banyak variabel yang secara statistik tidak signifikan. Selain itu, biasanya nilai statistik *Durbin-Watson* rendah, menunjukkan kemungkinan autokorelasi yang besar. Asumsi tentang kemiringan dan intersep yang sama juga mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk mengamati keunikan antar objek. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar terjadi bias dalam hasil estimasi (Gujarati, 2015).

### 3.3.2. Model *Fixed Effect*

Pendekatan model *Fixed Effect* memperkirakan bahwa intersep dari setiap individu berbeda, sementara kemiringan antar individu tetap atau sama. Pendekatan ini memanfaatkan variabel *dummy* untuk mencerminkan perbedaan intersep antar individu. Model *Fixed Effect* dengan menggunakan variabel *dummy* dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PEND_{1it} + \beta_2 KES_{2it} + \beta_3 EKO_{3it} + \beta_4 PFU_{4it} + \beta_5 D_{5it} + \dots + \varepsilon_{it}$$

### 3.3.3. Model *Random Effect*

Model *random effect* mirip dengan model *fixed effect*. Perbedaannya terletak pada cara penanganan perbedaan intersep. Jika pada model *fixed effect*, perbedaan intersep diakomodasi langsung karena ada perbedaan antara individu dan waktu, sedangkan pada model *random effect*, perbedaan intersep antara individu dan waktu disebabkan oleh *residual/error* yang terjadi secara acak. Model *random effect* menggunakan teknik *generalized least square* (GLS). Persamaan regresi pada model *random effect* juga menggunakan variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan antara individu. Secara umum, persamaan regresi dari model *random effect* dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y_{it} &= \bar{\beta}_o + \beta_1 \ln PEND_{1it} + \beta_2 \ln KES_{2it} + \beta_3 \ln EKO_{3it} \\
 &\quad + \beta_4 \ln PFU_{4it} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + (\varepsilon_{it} + \mu_i) \\
 Y_{it} &= \bar{\beta}_o + \beta_1 \ln PEND_{1it} + \beta_2 \ln KES_{2it} + \beta_3 \ln EKO_{3it} \\
 &\quad + \beta_4 \ln PFU_{4it} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + V_i
 \end{aligned}$$

Keterangan

|                                      |   |                                      |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| $Y_{it}$                             | : | Indeks Pembangunan Manusia           |
| $\bar{\beta}_o$                      | : | Rata-rata intersep populasi          |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ | : | Koefisien <i>PEND, KES, EKO, PFU</i> |

|                    |   |                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\ln PEND_{1it}$   | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (rupiah)                   |
| $\ln KES_{2it}$    | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (rupiah)                    |
| $\ln EKO_{3it}$    | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perekonomian (rupiah)                 |
| $\ln PFU_{4it}$    | : | Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum (rupiah) |
| $\alpha_k$         | : | Intersep variabel <i>dummy</i> dari masing-masing provinsi                      |
| $D_{ki}$           | : | variabel <i>dummy</i> dari masing-masing provinsi                               |
| $\varepsilon_{it}$ | : | variabel gangguan ( <i>error</i> )                                              |
| $\mu_i$            | : | variabel gangguan yang bersifat random                                          |
| $V_i$              | : | $\varepsilon_{it} + \mu_i$                                                      |

### 3.4. Pemilihan Model

Karena terdapat tiga model alternatif untuk mengestimasi regresi data panel, kita perlu memilih satu model yang paling optimal dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Proses pemilihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membandingkan model *common effect* dan model *fixed effect*. Tahap kedua adalah membandingkan model *fixed effect* dengan model *random effect*. Dengan menggunakan alat bantu *Eviews 12*, kedua tahap pengujian ini dapat dilakukan dengan uji *Chow* (antara *common effect* dan *fixed effect*), uji *Hausman* (antara *fixed effect* dan *random effect*), dan uji *Lagrange Multiple* (antara *random effect* dan *common effect*).

### 3.4.1. Uji *Chow*

Uji *Chow* (*Chow test*) diterapkan untuk menentukan pilihan yang optimal antara model *fixed effect* dan model *common effect* (Basuki dan Prawoto, 2016). Jika model *fixed effect* terbukti lebih superior daripada model *common effect*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji *Hausman*. Namun, jika model *common effect* lebih baik, maka tidak perlu melanjutkan ke uji *Hausman*, dan model *common effect* akan menjadi pilihan yang lebih tepat untuk analisis regresi. Uji *fixed effect* dapat dilakukan menggunakan uji F-statistik. Berikut ini adalah formulanya.

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U/q}{SSR_U/(n - k)}$$

Keterangan

|         |   |                                              |
|---------|---|----------------------------------------------|
| $SSR_R$ | : | <i>restricted sum squared of residuals</i>   |
| $SSR_U$ | : | <i>unrestricted sum squared of residuals</i> |
| $q$     | : | jumlah restriksi/pembatas dalam mode         |
| $n$     | : | jumlah observasi                             |
| $k$     | : | jumlah parameter estimasi                    |

Hipotesis dari uji *Chow* ini adalah sebagai berikut.

$H_0 = \text{common effect model}$  lebih baik dari pada *fixed effect model*

$H_1 = \text{fixed effect model}$  lebih baik dari pada *common effect model*

Penentuan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) terjadi dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai kritis F. Jika nilai F-statistik lebih rendah dari nilai kritis F, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-statistik lebih tinggi dari nilai kritis F, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak hipotesis nul ( $H_0$ ) atau menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

### 3.4.2. Uji *Hausman*

Apabila uji *Chow* menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih cocok, maka uji Hausman (*Hausman test*) dilakukan untuk menentukan model yang lebih optimal antara *fixed effect* dan *random effect* (Basuki dan Prawoto, 2016). Formula untuk menghitung nilai uji *Hausman* dapat ditemukan di bawah ini.

$$m = \hat{q} \text{var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Keterangan

|                       |   |                                                                       |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| $m$                   | : | nilai <i>Chi-squares</i> statistik dari uji <i>Hausman</i>            |
| $\hat{q}$             | : | perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien                  |
| $\text{var}(\hat{q})$ | : | kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien |

Hipotesis dari uji *Hausman* adalah sebagai berikut.

$H_0 = \text{random effect model}$  lebih baik dari pada *fixed effect model*

$H_1 = \text{fixed effect model}$  lebih baik dari pada *random effect model*

Hasil dari uji *Hausman* mengikuti distribusi *Chi-square*. Penentuan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) terjadi dengan membandingkan nilai statistik *Chi-square* dengan nilai kritis *Chi-square*. Nilai kritis *Chi-square* dapat ditemukan di dalam tabel distribusi *Chi-square* dengan *degree of freedom* ( $k$ ) yang sesuai dengan jumlah variabel independen. Apabila nilai kritis *Chi-square* lebih besar dari nilai statistik *Chi-square*, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Sebaliknya, jika nilai kritis *Chi-square* lebih kecil dari nilai statistik *Chi-square*, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak hipotesis nul ( $H_0$ ) atau menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

### 3.4.3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

adalah tes untuk menentukan apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang harus digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini diperkenalkan oleh *Breusch Pagan*. Metode *Breusch Pagan* untuk uji signifikansi *Random Effect* berdasarkan pada nilai *residual* dari metode OLS. Nilai statistik LM dihitung menggunakan formula berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n (T\hat{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan

$n$  : jumlah Individu

$T$  : jumlah periode waktu

$e$  : residual metode *Common Effect* (OLS)

Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut

H0 : *Common Effect Model* lebih baik dari pada *Random Effect Model*

H1 : *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang bergantung pada distribusi *chi-square* dengan derajat kebebasan sebanding dengan jumlah variabel independen, digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai (Widarjono, 2009). Jika nilai statistik LM melebihi nilai kritis *chi-square*, maka hipotesis nul ditolak dan metode *Random Effect* dipilih dibandingkan metode *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai kritis *chi-square*, maka hipotesis nul diterima dan metode *Common Effect* digunakan daripada metode *Random Effect*. Namun, dalam konteks ini, uji LM tidak diperlukan karena uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* adalah yang paling sesuai. Uji LM hanya relevan jika uji *Chow* menyatakan bahwa model *Common Effect* lebih cocok dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model *Random Effect* adalah yang paling tepat. Dalam situasi ini, uji LM diperlukan sebagai langkah akhir untuk menetapkan model mana yang lebih tepat, apakah *Common Effect* atau *Random Effect*.

### 3.5. Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk memverifikasi apakah hasil regresi mencerminkan keadaan sebenarnya dari populasi dengan tingkat akurasi yang memadai. Dalam penelitian ini, pengujian statistik akan meliputi pemeriksaan

koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kecocokan model (uji F), dan uji signifikansi variabel individual (uji t).

### 3.5.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian garis regresi dengan nilai sebenarnya (Widarjono, 2013). Rentang nilai koefisien determinasi adalah 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen. Perhitungan nilai koefisien determinasi dapat dilakukan menggunakan rumus berikut.

$$R^2 = \frac{ESC}{ESC + RSS}$$

Keterangan:

$R^2$  : koefisien determinasi

$ESS$  : *explained sum of squares*

$RSS$  : *residual sum of squares*

Kenaikan variabel independen akan meningkatkan nilai koefisien determinasi. Dalam penanganannya, solusi yang digunakan adalah adjusted  $R^2$ , yaitu versi koefisien determinasi yang telah disesuaikan.

### 3.5.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F, yang dikenal juga sebagai uji kecocokan model, merupakan metode pengujian yang memastikan apakah semua

variabel independen memiliki dampak pada variabel dependen. Nilai statistik F dapat dihitung menggunakan formula khusus.

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(n - k)}$$

Keterangan

$F$  : nilai F statistik

$R^2$  : koefisien determinasi

$n$  : jumlah observasi

$k$  : jumlah parameter estimasi

Prosedur pengujian uji F melibatkan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai kritis F. Nilai kritis F dapat ditemukan dengan menentukan *degree of freedom*. Dalam tabel distribusi F, terdapat dua derajat kebebasan, yaitu  $df(N1)$  dan  $df(N2)$ , yang dapat dihitung dengan rumus spesifik.

$df(N1)$  :  $k - 1$

$Df(N2)$  :  $n - k$

Kemudian, uji F memerlukan pembentukan hipotesis untuk menentukan tindakan selanjutnya. Hipotesis yang dibuat dari hasil uji F adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , secara simultan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  secara simultan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penentuan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) bergantung pada perbandingan antara nilai F-statistik dan nilai F kritis. Jika nilai F kritis lebih tinggi dari nilai F-statistik, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) ditolak. Sebaliknya, jika nilai F kritis lebih rendah dari nilai F-statistik, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) tidak ditolak, atau hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

### 3.5.3. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Pengujian signifikansi variabel independen, umumnya dikenal sebagai uji t, mengacu pada tabel distribusi t. Tujuan uji ini adalah untuk menilai dampak variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nilai kritis t dapat diidentifikasi dengan merujuk pada tabel distribusi t yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 5% (0,05), sehingga nilai t kritis dapat ditemukan dengan mencari df (*degree of freedom*) menggunakan rumus  $df = n - k$ . Di mana, n merupakan jumlah observasi, dan k merupakan jumlah variabel yang dianalisis (termasuk variabel independen dan dependen). Nilai Uji Signifikansi Variabel Independen dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{C_o}{SE}$$

Keterangan:

- $t$  : nilai t statistik
- $C_o$  : koefisien dari variabel regresi
- $SE$  : *standar error*

Keputusan yang didasarkan pada hipotesis di atas ditentukan dengan mempertimbangkan perbandingan antara nilai t kritis dan nilai t-statistik. Jika nilai t kritis lebih besar daripada nilai t-statistik, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) ditolak. Sebaliknya, jika nilai t kritis lebih kecil daripada nilai t-statistik, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) tidak ditolak, atau hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Deskripsi Data Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah berdasarkan bidangnya di sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder, bersumber dari situs web resmi Indonesia. Data yang ada dalam penelitian berbentuk data panel, yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* berupa 33 Provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* yaitu tahun 2010-2022. Variabel yang dianalisis meliputi variabel independen yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan (PEND), kesehatan (KES), ekonomi (EKO), dan perumahan serta fasilitas umum (PFU). Sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 Provinsi di Indonesia. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Econometric EViews 12 dan Microsoft Excel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis ekonometrik.

#### **Hasil Pengolahan Data**

Statistika deskriptif adalah analisis statistik yang menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk memberikan gambaran tentang karakteristik

variabel penelitian. Nilai total data dibagi dengan jumlah data yang ada adalah *mean*, dan standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari perbedaan nilai data dengan banyak data. Kemudian nilai tertinggi dalam data yang diteliti disebut maksimum, dan nilai terkecil yang ada dalam data tersebut sebagai minimum. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif**

|             | IPM    | PEND<br>(Milyar<br>Rupiah) | KES<br>(Milyar<br>Rupiah) | EKO<br>(Milyar<br>Rupiah) | PFU<br>(Milyar<br>Rupiah) |
|-------------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mean        | 69.02  | 2027.124                   | 762.3846                  | 708.5501                  | 832.0047                  |
| Median      | 69.05  | 894                        | 357                       | 395                       | 486                       |
| Maximum     | 81.65  | 22953                      | 11014                     | 8024                      | 11759                     |
| Minimum     | 54.45  | 3                          | 4                         | 7                         | 2                         |
| Std. Dev.   | 4.5813 | 3272.826                   | 1367.964                  | 870.7197                  | 1284.767                  |
| Observation | 429    | 429                        | 429                       | 429                       | 429                       |

Sumber: Lampiran I. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah observasi untuk 33 Provinsi selama 2010-2022 berjumlah 429 observasi (33 *cross section* dan 10 *time series*). Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2010-2022 sebesar 69,02 persen, dengan nilai tertinggi sebesar 81,65 persen, dan nilai terendah sebesar 54,45 persen. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PEND) selama tahun 2010-2022 sebesar 2027.124 (Milyar rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar 22953 (Milyar rupiah) dengan nilai terendah sebesar 3 (Milyar rupiah)

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (KES) selama tahun 2010-2022 sebesar 762.3846 (Milyar rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar 11014 (Milyar rupiah) dan nilai terendah sebesar 4 (Milyar rupiah). Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi (EKO) selama tahun 2010-2022 sebesar

708.5501 (Milyar Rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 8024 (Milyar rupiah) dan nilai terendah sebesar 7 (Milyar rupiah) Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum (PFU) selama tahun 2010-2022 sebesar 832.0047 (Milyar rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar 11759 (Milyar rupiah) dan nilai terendah sebesar 2 (Milyar rupiah).

Selanjutnya Pemilihan model bergantung pada asumsi yang diadopsi oleh peneliti dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data statistik yang benar, sehingga hasilnya dapat dijustifikasi secara statistik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu diambil adalah memilih model yang paling sesuai dari tiga model yang tersedia. Data panel yang telah dikumpulkan kemudian disubstitusi menggunakan model *fixed effect*, model *random effect*, dan model *common effect*, dengan hasil sebagai berikut:

#### 4.1.1. Regresi *Fixed Effect* Model

Model *Fixed Effect* adalah model di mana intercept berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi slope untuk setiap subjek tetap tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept bervariasi di antara subjek, sementara slope tetap konstan di antara subjek. Model ini sering dikenal sebagai Model *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Output regresi dari Model *Fixed Effect* dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi *Fixed Effect Model***

| Variabel           | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                  | 24.27937    | 4.236181   | 5.731430    | 0.0000 |
| LOG(PEND)          | 0.915509    | 0.091196   | 10.03895    | 0.0000 |
| LOG(KES)           | 1.125891    | 0.189527   | 5.940535    | 0.0000 |
| LOG(EKO)           | 0.182963    | 0.169756   | 1.077800    | 0.2818 |
| LOG(PFU)           | -0.571629   | 0.078788   | -7.255267   | 0.0000 |
| R-squared          | 0.917695    |            |             |        |
| F-statistic        | 121.4096    |            |             |        |
| Prob (F-statistic) | 0.000000    |            |             |        |

Sumber: Olah Data Eviews 12

**4.1.2. Regresi *Random Effect Model***

Model *random effect* terjadi karena variasi dalam nilai dan arah hubungan antara subjek diasumsikan sebagai acak, yang dinyatakan dalam bentuk sisa. Model ini melakukan estimasi pada data panel di mana variabel sisa diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect*. Prosedur analisis data panel menggunakan model *random effect* harus memenuhi syarat bahwa jumlah cross section harus lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Output dari regresi model *random effect* dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 3 Hasil Analisis Regresi *Random Effect Model***

| Variabel           | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                  | 24.60646    | 4.225534   | 5.823278    | 0.0000 |
| LOG(PEND)          | 0.923790    | 0.090829   | 10.17068    | 0.0000 |
| LOG(KES)           | 1.117875    | 0.187937   | 5.948124    | 0.0000 |
| LOG(EKO)           | 0.170559    | 0.168994   | 1.009259    | 0.3134 |
| LOG(PFU)           | -0.571907   | 0.078531   | -7.282527   | 0.0000 |
| R-squared          | 0.5700875   |            |             |        |
| F-statistic        | 141.0142    |            |             |        |
| Prob (F-statistic) | 0.000000    |            |             |        |

Sumber: Olah Data Eviews 12

**4.1.3. Regresi *Common Effect Model***

Model *common effect* adalah sebuah model regresi yang mengintegrasikan data *cross section* dan *time series*, dan memanfaatkan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Model *common effect* ini adalah model yang paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Hasil regresi dari model *common effect* dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. 4 Hasil Analisis *Common Effect Model***

| Variabel           | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                  | 33.52222    | 6.239659   | 5.372444    | 0.0000 |
| LOG(PEND)          | 1.450494    | 0.222053   | 6.532207    | 0.0000 |
| LOG(KES)           | 0.946384    | 0.360484   | 2.625315    | 0.0090 |
| LOG(EKO)           | -0.617470   | 0.386207   | -1.598808   | 0.1106 |
| LOG(PFU)           | -0.483868   | 0.191808   | -2.522669   | 0.0120 |
| R-squared          | 0.241101    |            |             |        |
| F-statistic        | 33.67600    |            |             |        |
| Prob (F-statistic) | 0.000000    |            |             |        |

Sumber: Olah Data Eviews 12

### Pemilihan Model Regresi

Penentuan model terbaik di antara model *ranfom effect*, *fixed effect*, dan *common effect* dilakukan melalui tiga teknik estimasi model. Ketiga teknik ini diterapkan dalam regresi data panel untuk mendapatkan model yang paling sesuai dalam mengestimasi regresi data panel. Uji pertama adalah *Chow Test*, yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *fixed effect*. Uji kedua adalah *Hausman Test*, yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Sementara itu, uji ketiga adalah *Lagrange Multiplier (LM) Test*, yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *random effect*. Setiap uji ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

#### 4.1.4. *Chow Test*

Setelah mendapatkan hasil dari model *common effect* dan model *fixed effect*, langkah berikutnya adalah melakukan uji *Chow*. *Chow test* adalah prosedur untuk membandingkan model *common effect* atau model *fixed effect*. Dalam pendekatan ini, apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha (5%) maka model terbaik adalah *common effect model*. Namun, jika nilai probabilitas kurang dari alpha (5%) maka model terbaik adalah *fixed effect model*. Hasil *chow test* dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 5 Hasil *Chow Test***

| Effects Test              | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F           | 100.701344 | (32,392) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-squared | 952.993989 | 32       | 0.0000 |

Sumber: Olah Data Eviews 12

Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar  $0.0000 < 0.05$  dan nilai probabilitas *Cross-section Chi-squared* sebesar  $0.0000 < 0.05$ . maka menolak  $H_0$  yang artinya model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *fixed effect model* lebih tepat dibandingkan dengan *common effect model*.

#### 4.1.5. *Hausman Test*

Hasil dari pengujian *Chow test* menunjukkan bahwa regresi yang lebih sesuai untuk digunakan adalah regresi *fixed effect model*. Maka akan dilanjutkan dengan *hausman test*, yang merupakan uji untuk membandingkan *random effect model* dengan *fixed effect model*. Jika nilai probabilitas *Cross-section random* lebih besar dari alpha (5%) maka model terbaik adalah *random effect model*, dan jika

nilai probabilitas kurang dari alpha (5%) maka model yang paling cocok adalah *fixed effect model*. Hasil *hausman test* dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 6 Hasil *Hausman Test***

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob   |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 3.697949          | 4            | 0.4484 |

Sumber: Olah Data Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar  $0.4484 > 0.05$  maka gagal menolak  $H_0$  yang artinya model yang terpilih adalah *random effect model* yang paling tepat dibandingkan dengan *fixed effect model*.

#### 4.1.6. *Lagrange Multiplier (LM) Test*

Hasil pengujian *Chow test* dan *Hausman test* menegaskan bahwa regresi yang sesuai untuk digunakan adalah regresi *fixed effect model* dan *random effect model*. Namun, untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan *lagrange multiplier test*. *Lagrange multiplier test* merupakan uji untuk membandingkan *common effect model* dengan *random effect model*. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha (5%) maka *common effect model* adalah yang terbaik. Tetapi ketika nilai probabilitas kurang dari alpha (5%) maka *random effect model* adalah yang terbaik. Hasil *lagrange multiplier test* dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 7 Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test**

|               | Test          |          |          |
|---------------|---------------|----------|----------|
|               | Hypothesis    |          |          |
|               | Cross-section | Time     | Both     |
| Breusch-Pagan | 1933.766      | 10.88973 | 1944.655 |
|               | 0.0000        | 0.0010   | 0.0000   |

Sumber: Olah Data Eviews 12

Dalam penelitian ini, uji *Lagrange multiplier* menggunakan metode *Breusch-Pagan*. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas kedua *Breusch-Pagan* adalah 0.0000, yang kurang dari 0.05, sehingga hipotesis nol ditolak, menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model random effect. Temuan ini mengindikasikan bahwa model *random effect* lebih cocok dibandingkan dengan model *common effect*.

### **Model Regresi Terbaik**

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji F atau Simultan (Uji Kelayakan Model), Uji t atau Parsial (Uji Signifikan), dan Intercept menggunakan regresi *random effect model*. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan model terbaik yaitu *random effect model*. Hasil *random effect model* dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Uji Hipotesis**

| Variabel           | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                  | 24.60646    | 4.225534   | 5.823278    | 0.0000 |
| LOG(PEND)          | 0.923790    | 0.090829   | 10.17068    | 0.0000 |
| LOG(KES)           | 1.117875    | 0.187937   | 5.948124    | 0.0000 |
| LOG(EKO)           | 0.170559    | 0.168994   | 1.009259    | 0.3134 |
| LOG(PFU)           | -0.571907   | 0.078531   | -7.282527   | 0.0000 |
| R-squared          | 0.5700875   |            |             |        |
| F-statistic        | 141.0142    |            |             |        |
| Prob (F-statistic) | 0.000000    |            |             |        |

Sumber: Olah Data Eviews 12

**4.1.7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau *coefficient of determination* ( $R^2$ ) mengukur proporsi atau persentase total variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi adalah tujuan dari pengujian ini. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau determinasi dari variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil uji ini menunjukkan nilai *R-Squared* sebesar 0.5700875 atau 57.0087%. nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum mampu menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia di Indonesia sebesar 57.0087%,

sedangkan sisanya yaitu 44.8410% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### **4.1.8. Uji simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum secara simultan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan Nilai F hitung sebesar 141.0142 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.000000 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2010-2022.

#### **4.1.9. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial-parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PEND) didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan positif sebesar 0.923790 dengan probabilitas  $0.0000 < 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022.

2. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (KES) didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan positif sebesar 1.117875 dengan probabilitas  $0.0000 < 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022.
3. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi (EKO) didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi sebesar 0.170559 dengan probabilitas  $0.3134 > 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi tidak signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022.
4. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum (PFU) didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum negatif sebesar -0.571907 dengan probabilitas  $0.0000 < 0.05$  sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022.

#### 4.1.10. Interpretasi Hasil

$$Y = 24.60 + 0.9237 \text{ LOG(PEND)} + 1.1178 \text{ LOG(KES)} + 0.1705 \text{ LOG(EKO)} - 0.5719 \text{ LOG(PFU)}$$

1. Nilai konstanta sebesar 24.60 artinya tanpa adanya variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PEND), bidang kesehatan (KES), bidang ekonomi (EKO) dan bidang perumahan dan fasilitas umum (PFU) maka variabel indeks pembangunan manusia (IPM) akan mengalami peningkatan sebesar 24.60%.
2. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PEND) sebesar 0.9237, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel PEND mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks pembangunan manusia (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.9237%.
3. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (KES) sebesar 1.1178, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel KES mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks pembangunan manusia (IPM) akan mengalami peningkatan sebesar 1.1178%.
4. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi (EKO) sebesar 0.1705, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel EKO mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks pembangunan manusia (IPM) akan mengalami peningkatan sebesar 0.1178%.
5. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum (PFU) sebesar -0.5719, jika nilai variabel lain

konstanta dan variabel PFU mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks pembangunan manusia (IPM) akan mengalami penurunan sebesar 0.5719%.

#### 4.1.11. Intercept

**Tabel 4. 9 *Cross Effect***

| PROVINSI           | Effect    |          |          |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| Aceh               | -0.807584 | 24.60646 | 23.79888 |
| Sumatera Utara     | 0.388177  | 24.60646 | 24.99464 |
| Sumatera Barat     | 1.401642  | 24.60646 | 26.0081  |
| Riau               | 1.446074  | 24.60646 | 26.05253 |
| Jambi              | 0.488563  | 24.60646 | 25.09502 |
| Sumatera Selatan   | -0.503023 | 24.60646 | 24.10344 |
| Bengkulu           | 0.888209  | 24.60646 | 25.49467 |
| Lampung            | -2.053555 | 24.60646 | 22.55291 |
| DKI Jakarta        | 5.786647  | 24.60646 | 30.39311 |
| Jawa Barat         | -1.866523 | 24.60646 | 22.73994 |
| Jawa Tengah        | -1.790614 | 24.60646 | 22.81585 |
| DI Yogyakarta      | 10.30419  | 24.60646 | 34.91065 |
| Jawa Timur         | -2.843202 | 24.60646 | 21.76326 |
| Kalimantan Barat   | -3.040327 | 24.60646 | 21.56613 |
| Kalimantan Tengah  | 0.965616  | 24.60646 | 25.57208 |
| Kalimantan Selatan | -0.876005 | 24.60646 | 23.73046 |
| Kalimantan Timur   | 4.715475  | 24.60646 | 29.32194 |

|                     |           |          |          |
|---------------------|-----------|----------|----------|
| Sulawesi Utara      | 3.131821  | 24.60646 | 27.73828 |
| Sulawesi Tengah     | -1.174067 | 24.60646 | 23.43239 |
| Sulawesi Selatan    | -0.517992 | 24.60646 | 24.08847 |
| Sulawesi Tenggara   | 1.151967  | 24.60646 | 25.75843 |
| Bali                | 4.847653  | 24.60646 | 29.45411 |
| Nusa Tenggara Barat | -2.342729 | 24.60646 | 22.26373 |
| Nusa Tenggara Timur | -5.597229 | 24.60646 | 19.00923 |
| Maluku              | -0.278288 | 24.60646 | 24.32817 |
| Papua               | -11.21933 | 24.60646 | 13.38713 |
| Maluku Utara        | -1.175419 | 24.60646 | 23.43104 |
| Banten              | 1.603076  | 24.60646 | 26.20954 |
| Bangka Belitung     | 1.815546  | 24.60646 | 26.42201 |
| Gorontalo           | -0.468907 | 24.60646 | 24.13755 |
| Kepulauan Riau      | 5.642534  | 24.60646 | 30.24899 |
| Papua Barat         | -4.312799 | 24.60646 | 20.29366 |
| Sulawesi Barat      | -3.709596 | 24.60646 | 20.89686 |

Sumber: Olah Data Eviews 12

Dari tabel 4.9, dapat diamati bahwa setiap provinsi memiliki koefisien model efek acak yang berbeda-beda. Hal ini menggambarkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan serta fasilitas umum memiliki dampak yang bervariasi pada indeks pembangunan manusia di masing-masing provinsi di Indonesia.

1. Aceh

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Aceh yaitu 23.79888 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Aceh sebesar 23.79888.

2. Sumatera Utara

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sumatera Utara yaitu 24.99464 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 24.99464.

3. Sumatera Barat

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sumatera Barat yaitu 26.0081 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Barat sebesar 26.0081.

4. Riau

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Riau yaitu 26.05253 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap,

maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Riau sebesar 26.05253.

5. Jambi

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jambi yaitu 25.09502 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jambi sebesar 25.09502.

6. Sumatera Selatan

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sumatera Selatan yaitu 24.10344 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 24.10344.

7. Bengkulu

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Bengkulu yaitu 25.49467 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Bengkulu sebesar 25.49467

8. Lampung

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Lampung yaitu 22.55291 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Lampung sebesar 22.55291.

#### 9. DKI Jakarta

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi DKI Jakarta yaitu 30.39311 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 30.39311.

#### 10. Jawa Barat

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jawa Barat yaitu 22.73994 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Barat sebesar 22.73994.

#### 11. Jawa Tengah

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 22.81585 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 22.81585.

#### 12. DI Yogyakarta

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi DI Yogyakarta yaitu 34.91065 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 34.91065.

#### 13. Jawa Timur

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jawa Timur yaitu 21.76326 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Timur sebesar 21.76326.

#### 14. Kalimantan Barat

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Kalimantan Barat yaitu 21.56613 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar 21.56613.

#### 15. Kalimantan Tengah

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 25.57208 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 25.57208.

#### 16. Kalimantan Selatan

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 23.73046 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 23.73046.

#### 17. Kalimantan Timur

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu 29.32194 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29.32194.

#### 18. Sulawesi Utara

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu 27.73828 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 27.73828.

#### 19. Sulawesi Tengah

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 23.43239 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan,

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 23.43239.

#### 20. Sulawesi Selatan

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 24.08847 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 24.08847.

#### 21. Sulawesi Tenggara

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 25.75843 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 25.75843.

#### 22. Bali

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Bali yaitu 29.45411 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Bali sebesar 29.45411.

#### 23. Nusa Tenggara Barat

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 22.26373 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 22.26373.

#### 24. Nusa Tenggara Timur

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 19.00923 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 19.00923.

#### 25. Maluku

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Maluku yaitu 24.32817 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Maluku sebesar 24.32817.

#### 26. Papua

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Papua yaitu 13.38713 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Papua sebesar 13.38713.

27. Maluku Utara

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Maluku Utara yaitu 23.43104 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Maluku Utara sebesar 23.43104.

28. Banten

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Banten yaitu 26.20954 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Banten sebesar 26.20954.

29. Bangka Belitung

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Bangka Belitung yaitu 26.42201 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Bangka Belitung sebesar 26.42201.

30. Gorontalo

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Gorontalo yaitu 24.13755 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Gorontalo sebesar 24.13755.

#### 31. Kepulauan Riau

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Kepulauan Riau yaitu 30.24899 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 30.24899.

#### 32. Papua Barat

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Papua Barat yaitu 20.29366 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Papua Barat sebesar 20.29366.

#### 33. Sulawesi Barat

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Sulawesi Barat yaitu 20.89686 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 20.89686.

## **Pembahasan**

Pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis yang diperoleh melalui penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

### **4.1.12. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ada pengaruh positif karena jika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mengalami peningkatan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Jika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mengalami penurunan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022. Hasil analisis regresi ini sesuai dengan teori Keynesian. Teori ini berfokus pada peran pengeluaran pemerintah dalam mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi, terutama dalam situasi resesi atau penganggaran. Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat merangsang permintaan agregat dan menghidupkan kembali perekonomian dengan meningkatkan pengeluaran publik, terutama dalam bentuk pengeluaran infrastruktur dan program-program stimulus ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sethi et al., 2020) dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di negara-negara Asia Selatan. Dimana dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang meningkat akan melahirkan masyarakat yang mampu bersaing dalam berbagai bidang ilmu sehingga akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi lebih baik. IPM melibatkan indikator seperti harapan hidup, angka melek huruf, akses ke pendidikan, dan pendapatan per kapita. Selain itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan juga akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

#### **4.1.13. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan ada pengaruh positif karena jika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Jika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami penurunan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Variabel

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022. Hasil analisis ini sesuai dengan teori Keynesian yang dikemukakan oleh ekonom John Maynard Keynes. Dalam teori tersebut mendukung peran pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui pengeluaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mongan, 2019). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Investasi pemerintah di sektor kesehatan melibatkan penyaluran dana untuk mengakuisisi dan merawat infrastruktur fisik maupun nonfisik dalam bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas publik yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan, kebutuhan dasar akan kesehatan dapat terpenuhi, mengakibatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengalokasikan sumber daya pemerintah secara optimal, khususnya dalam sektor kesehatan, maka peningkatan kualitas kesehatan dapat dicapai, yang pada gilirannya memungkinkan terwujudnya produktivitas yang lebih tinggi.

#### **4.1.14. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa

ada bukti yang menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor ekonomi tidak memiliki dampak signifikan yang bersifat positif terhadap indeks pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi ada pengaruh positif karena Pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi sering kali difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, investasi dalam industri tertentu, dan stimulus fiskal. Meskipun hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pengaruhnya terhadap aspek-aspek lain yang memengaruhi IPM seperti pendidikan dan kesehatan mungkin tidak sebesar atau signifikan. Di samping itu, Meskipun pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan peluang ekonomi bagi sebagian masyarakat, namun tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih tinggi di Indonesia dapat menghambat efek positifnya terhadap IPM secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang merata masih menjadi tantangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Barro, 1990). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah yang besar dalam sektor ekonomi bisa menyebabkan efek crowding out, di mana sektor swasta mengalami penurunan investasi karena persaingan sumber daya yang lebih sedikit. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pada akhirnya mempengaruhi IPM. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dalam sektor ekonomi dapat menjadi tidak efisien, misalnya karena korupsi, birokrasi yang berlebihan, atau alokasi yang tidak tepat. Hal ini dapat mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan oleh pengeluaran tersebut terhadap IPM (Acemoglu & Robinson., 2012).

#### **4.1.15. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada bukti yang menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor perumahan dan fasilitas umum memiliki dampak signifikan yang bersifat negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum ada pengaruh negatif karena pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum tidak diarahkan dengan baik, kualitas infrastruktur dapat menurun. Fasilitas umum yang buruk, seperti jalan rusak, sistem air yang tidak memadai, atau kurangnya aksesibilitas ke fasilitas kesehatan, dapat menghambat perkembangan manusia.

Temuan ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh (Halim, dkk, 2022). Penelitian tersebut mencatat bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh negatif, namun signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang juga turut berkontribusi terhadap IPM, sehingga dampak dari alokasi pengeluaran pemerintah tersebut mungkin terdapat pembatasan. Beberapa penelitian telah menyoroti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga mungkin tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel terkait, namun mungkin

memiliki dampak tidak langsung melalui variabel mediator, seperti kemiskinan. Terlebih lagi, peran pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang juga perlu diperhatikan, karena efeknya mungkin baru akan termanifestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, meskipun terdapat pengaruh yang negatif namun signifikan dari alokasi pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap IPM, hal ini mungkin disebabkan oleh kerumitan faktor-faktor yang memengaruhi IPM serta kemungkinan terdapat penundaan dalam munculnya dampak dari alokasi tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2022 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model estimasi regresi yang digunakan adalah *random effect model*. Variabel independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum mampu menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia di Indonesia sebesar 57.0875%, sedangkan sisanya yaitu 42.9125% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini.
2. Berdasarkan temuan penelitian, variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Dengan nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 0.923790, variabel indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0.923790% jika variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan meningkat 1% dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara nyata akan menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Berdasarkan temuan penelitian, ada korelasi positif dan signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Dengan nilai probabilitas 0.0000 kurang dari 0.05 dan koefisien 1.117875, variabel indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 1.117875% jika variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan meningkat 1%, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara nyata akan menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Menurut temuan penelitian, variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 memiliki korelasi positif dan tidak signifikan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Dengan nilai probabilitas 0.3134 lebih dari 0.05 dan koefisien 0.170559, variabel indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan sebesar 0.170559% jika variabel pemerintah di bidang ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi memiliki efek positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
5. Berdasarkan temuan peneliti, variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Dengan nilai probabilitas 0.0000 kurang dari 0.05 dan koefisien -0.571907, variabel indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan 0.571907% jika

nilai variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum meningkat 1%, dan sebaliknya.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, implikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu paling sedikit 20% dari APBN dan APBD. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah pada pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu paling sedikit 5% dari total anggaran APBN dan 10% dari total anggaran APBD. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian, dengan fokus pada kesehatan, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang tercermin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program ekonomi dan pengeluaran pemerintah guna memastikan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung IPM. Kemudian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, memastikan bahwa manfaat ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
4. Pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah harus berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun dampaknya mungkin tidak langsung signifikan pada IPM, infrastruktur yang baik akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, pemerintah dapat mendorong pengembangan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, serta memastikan akses masyarakat terhadap perumahan layak. Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, sehingga dalam penelitian berikutnya diharapkan peneliti dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia

dan merumuskan solusi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.5>
- Azwardi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Serta Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1–11. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/4862>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badrudin, R., & Khasanah, M. (2011). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*, 9, 23–30.
- Bappenas. (2003). *Kajian Bappenas*. Jakarta.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103-S125.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto (2016), “Analisis Regresi dalam Penelitian

Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews”, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Craigwell, R., Bynoe, D., & Lowe, S. (2012). The effectiveness of government expenditure on education and health care in the Caribbean. *International Journal of Development Issues*, 11(1), 4–18.  
<https://doi.org/10.1108/14468951211213831>

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Yogyakarta.

Edeme, R. K. (2014). Analyzing the Effects of Sectoral Public Spending On Human Development in Nigeria : Evidence from Panel Data. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 19(9), 1–13.

Fadilah, A., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2018). A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2), 130–139.  
<http://dx.doi.org/10.17977/um002v10i22018p130>

Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Reasearch Journal*, 1(1), 108–118. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2366/1851>

Fattah, S., & Muji, A. (2012). Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jenepono Regency, South Sulawesi, Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 5(6), 40–50.

Fukuda-Parr, S. (2003). The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen’s Ideas on Capabilities. *Feminist Economics*, 9(2–3), 301–317.

- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter (2015), “Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5 - Buku 2)”, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim,A., Muzdalifah., Rahayu,D., (2022) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kab/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8)
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130–140. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Kuncoro, M. (2013). Indikator Ekonomi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Kusumaningrum, Ratna Ayu (2018). Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006 – 2016.
- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 193–208. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9472>
- Mangkoesoebroto, D. (2016). Ekonomi publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Manuelli, R. E. (2015). Human Capital and Development. Federal Reserve Bank of St. Louis Review. Third Quarter.

- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Nanga, M. (2000). Mencermati pergeseran dalam paradigma pembangunan. *Meditek*, Vol. 8 (No. 21).
- Prasetyo, Imam Dwi. (2017). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap IPM. Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5(2012), 615–622. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5).
- Pratama, M. I. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung. *Universitas Islam Indonesia*.
- Ratnasari, Triya Gita. dkk. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, Vol 3. No 2
- Razmi, M. J., Abbasian, E., & Mohammadi, S. (2012). Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, II(5).
- Ritonga, I. (2014). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:Lembaga Kajian manajemen Pemerintah Daerah.
- Rumate, V. A., Sanggelorang, S. M. M., dan Siwu, H. F. DJ. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 (2),

1-11.

Safitri, I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 66–76.

Sanggелorang, S. M., Rumatе, V. A., & Siwu, H. F. D. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–11.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom (First)*. New York: Random House, Inc.

Sethi, N., Mohanty, S., Das, A., & Sahoo, M. (2020). Health Expenditure and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from South Asian Countries. *Global Business Review*, October. <https://doi.org/10.1177/0972150920963069>

Sriyana, Jaka (2014), “Metode Regresi Data Panel”, Ekonisia, Yogyakarta.

Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia* (8th ed.). Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi* (Edisi Kesebelas ed.). Erlangga.

UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. <https://doi.org/0-19-506481-X>

UNDP. (1995). “Human Development Report” United Nations Development Programme. New York

- Wahid, A., & Bilal. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1996-2011. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. EKONISIA. Yogyakarta.
- Widarjono, A. (2013), “Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi Keempat), UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- Wijayanto, A., Khusaini, M., & Syafitri, W. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan serta PDRB terhadap IPM (Studi Terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, 1(2), 85–95.
- Winarti, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Data Penelitian

| Provinsi                | ID | Tahun | IPM   | PEND  | KES   | EKO   | PFU   |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aceh                    | 1  | 2010  | 67.09 | 923   | 664   | 1,086 | 2,028 |
| Aceh                    | 1  | 2011  | 67.45 | 962   | 799   | 1,090 | 1,642 |
| Aceh                    | 1  | 2012  | 67.81 | 946   | 871   | 1,194 | 1,932 |
| Aceh                    | 1  | 2013  | 68.3  | 2,273 | 1,419 | 1,579 | 2,067 |
| Aceh                    | 1  | 2014  | 68.81 | 2,045 | 1,972 | 2,182 | 3,811 |
| Aceh                    | 1  | 2015  | 69.45 | 2,323 | 1,537 | 1,585 | 2,530 |
| Aceh                    | 1  | 2016  | 70    | 957   | 1,378 | 1,422 | 2,178 |
| Aceh                    | 1  | 2017  | 70.6  | 3,559 | 1,719 | 1,400 | 1,524 |
| Aceh                    | 1  | 2018  | 71.19 | 3,780 | 1,902 | 1,452 | 2,816 |
| Aceh                    | 1  | 2019  | 71.9  | 4,387 | 2,369 | 1,634 | 2,335 |
| Aceh                    | 1  | 2020  | 71.99 | 4,739 | 1,853 | 2,023 | 2,595 |
| Aceh                    | 1  | 2021  | 72.18 | 4,977 | 2,469 | 1,192 | 2,395 |
| Aceh                    | 1  | 2022  | 72.8  | 3,859 | 2,141 | 2,869 | 1,358 |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2010  | 67.09 | 1,090 | 181   | 331   | 418   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2011  | 67.34 | 1,371 | 228   | 416   | 526   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2012  | 67.74 | 385   | 288   | 656   | 793   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2013  | 68.36 | 2,159 | 359   | 655   | 828   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2014  | 68.87 | 2,322 | 386   | 704   | 891   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2015  | 69.51 | 2,521 | 364   | 611   | 871   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2016  | 70    | 69    | 57    | 60    | 680   |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2017  | 70.57 | 5,354 | 490   | 844   | 1,563 |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2018  | 71.18 | 5,336 | 557   | 765   | 1,405 |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2019  | 71.74 | 5,785 | 540   | 754   | 1,095 |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2020  | 71.77 | 6,657 | 704   | 913   | 1,461 |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2021  | 72    | 4,335 | 492   | 910   | 68    |
| Provinsi Sumatera Utara | 2  | 2022  | 72.71 | 3,036 | 812   | 1,313 | 453   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2010  | 67.25 | 193   | 193   | 186   | 399   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2011  | 67.81 | 116   | 230   | 250   | 462   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2012  | 68.36 | 126   | 306   | 317   | 661   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2013  | 68.91 | 505   | 236   | 246   | 317   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2014  | 69.36 | 122   | 438   | 381   | 785   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2015  | 69.98 | 969   | 456   | 382   | 625   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2016  | 70.73 | 147   | 638   | 426   | 708   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2017  | 71.24 | 1,922 | 610   | 433   | 509   |
| Provinsi Sumatera Barat | 3  | 2018  | 71.73 | 2,183 | 670   | 496   | 536   |

|                           |   |      |       |       |       |       |       |
|---------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provinsi Sumatera Barat   | 3 | 2019 | 72.39 | 3,185 | 712   | 486   | 486   |
| Provinsi Sumatera Barat   | 3 | 2020 | 72.38 | 3,247 | 877   | 548   | 505   |
| Provinsi Sumatera Barat   | 3 | 2021 | 72.65 | 3,023 | 624   | 89    | 55    |
| Provinsi Sumatera Barat   | 3 | 2022 | 73.26 | 2,222 | 755   | 1,014 | 223   |
| Provinsi Riau             | 4 | 2010 | 68.65 | 753   | 279   | 438   | 792   |
| Provinsi Riau             | 4 | 2011 | 68.9  | 984   | 296   | 394   | 835   |
| Provinsi Riau             | 4 | 2012 | 69.15 | 733   | 427   | 519   | 1,610 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2013 | 69.91 | 1,744 | 639   | 681   | 1,200 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2014 | 70.33 | 376   | 519   | 522   | 613   |
| Provinsi Riau             | 4 | 2015 | 70.84 | 1,811 | 657   | 601   | 1,333 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2016 | 71.2  | 629   | 709   | 645   | 1,703 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2017 | 71.79 | 3,158 | 865   | 452   | 1,496 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2018 | 72.44 | 2,973 | 760   | 421   | 1,193 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2019 | 73    | 3,071 | 919   | 450   | 1,023 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2020 | 72.71 | 3,726 | 1,140 | 519   | 1,392 |
| Provinsi Riau             | 4 | 2021 | 72.94 | 2,349 | 885   | 479   | 908   |
| Provinsi Riau             | 4 | 2022 | 73.52 | 2,429 | 1,200 | 1,380 | 387   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2010 | 65.39 | 179   | 138   | 231   | 323   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2011 | 66.14 | 173   | 197   | 209   | 423   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2012 | 66.94 | 241   | 216   | 273   | 653   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2013 | 67.76 | 854   | 336   | 355   | 484   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2014 | 68.24 | 868   | 333   | 295   | 547   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2015 | 68.89 | 860   | 362   | 330   | 561   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2016 | 69.62 | 211   | 371   | 362   | 844   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2017 | 69.99 | 1,385 | 408   | 286   | 64    |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2018 | 70.65 | 1,506 | 458   | 317   | 619   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2019 | 71.26 | 1,654 | 488   | 362   | 652   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2020 | 71.29 | 1,824 | 490   | 375   | 907   |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2021 | 71.63 | 878   | 132   | 279   | 22    |
| Provinsi Jambi            | 5 | 2022 | 72.14 | 1,048 | 622   | 944   | 80    |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2010 | 64.44 | 552   | 341   | 277   | 763   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2011 | 65.12 | 256   | 297   | 335   | 887   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2012 | 65.79 | 249   | 238   | 367   | 899   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2013 | 66.16 | 1,230 | 291   | 455   | 936   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2014 | 66.75 | 251   | 180   | 395   | 773   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2015 | 67.46 | 1,160 | 299   | 327   | 893   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2016 | 68.24 | 130   | 189   | 295   | 619   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2017 | 68.86 | 1,597 | 373   | 282   | 987   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2018 | 69.39 | 1,758 | 433   | 296   | 1,311 |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2019 | 70.02 | 3,024 | 349   | 305   | 1,474 |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2020 | 70.01 | 3,361 | 279   | 344   | 765   |
| Provinsi Sumatera Selatan | 6 | 2021 | 70.24 | 665   | 156   | 1,319 | 56    |

|                           |    |      |       |        |        |       |        |
|---------------------------|----|------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Provinsi Sumatera Selatan | 6  | 2022 | 70.9  | 2,235  | 719    | 1,285 | 220    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2010 | 65.35 | 73     | 124    | 119   | 136    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2011 | 65.96 | 78     | 162    | 154   | 128    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2012 | 66.61 | 133    | 197    | 175   | 235    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2013 | 67.5  | 353    | 205    | 181   | 234    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2014 | 68.06 | 430    | 250    | 221   | 286    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2015 | 68.59 | 493    | 310    | 237   | 338    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2016 | 69.33 | 135    | 315    | 239   | 292    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2017 | 69.95 | 680    | 357    | 195   | 525    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2018 | 70.64 | 789    | 349    | 224   | 350    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2019 | 71.21 | 1,071  | 375    | 210   | 546    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2020 | 71.4  | 1,210  | 430    | 213   | 379    |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2021 | 71.64 | 605    | 194    | 234   | 2      |
| Provinsi Bengkulu         | 7  | 2022 | 72.16 | 846    | 250    | 375   | 94     |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2010 | 63.71 | 254    | 178    | 168   | 420    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2011 | 64.2  | 776    | 213    | 246   | 392    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2012 | 64.87 | 1,160  | 319    | 368   | 586    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2013 | 65.73 | 1,174  | 323    | 373   | 593    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2014 | 66.42 | 1,346  | 370    | 427   | 680    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2015 | 66.95 | 1,451  | 411    | 357   | 793    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2016 | 67.65 | 195    | 562    | 359   | 960    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2017 | 68.25 | 2,531  | 587    | 363   | 1,310  |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2018 | 69.02 | 2,713  | 558    | 331   | 1,491  |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2019 | 69.57 | 2,757  | 550    | 320   | 781    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2020 | 69.69 | 3,070  | 715    | 408   | 823    |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2021 | 69.9  | 2,949  | 715    | 397   | 21     |
| Provinsi Lampung          | 8  | 2022 | 70.45 | 1,598  | 860    | 1,040 | 140    |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2010 | 76.31 | 7,329  | 2,059  | 2,004 | 4,253  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2011 | 76.98 | 8,356  | 2,482  | 3,098 | 4,440  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2012 | 77.53 | 10,164 | 2,912  | 3,448 | 5,156  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2013 | 78.08 | 11,082 | 4,937  | 3,172 | 6,208  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2014 | 78.39 | 10,937 | 4,872  | 3,131 | 6,127  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2015 | 78.99 | 12,693 | 5,387  | 3,612 | 7,143  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2016 | 79.6  | 12,978 | 6,566  | 3,345 | 8,580  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2017 | 80.06 | 13,263 | 7,744  | 3,077 | 10,017 |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2018 | 80.47 | 16,153 | 8,936  | 3,719 | 8,835  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2019 | 80.76 | 21,779 | 8,894  | 5,202 | 7,004  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2020 | 80.77 | 22,953 | 10,352 | 5,048 | 11,759 |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2021 | 81.11 | 19,801 | 11,014 | 4,134 | 7,964  |
| Provinsi DKI Jakarta      | 9  | 2022 | 81.65 | 15,519 | 10,299 | 8,024 | 3,129  |
| Provinsi Jawa Barat       | 10 | 2010 | 66.15 | 659    | 382    | 833   | 1,074  |
| Provinsi Jawa Barat       | 10 | 2011 | 66.67 | 3,210  | 415    | 1,021 | 579    |

|                        |    |      |       |        |       |       |       |
|------------------------|----|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2012 | 67.32 | 5,275  | 683   | 1,678 | 951   |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2013 | 68.25 | 5,735  | 742   | 1,824 | 1,034 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2014 | 68.8  | 6,483  | 839   | 2,062 | 1,169 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2015 | 69.5  | 7,545  | 935   | 1,764 | 1,521 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2016 | 70.05 | 7,762  | 903   | 1,383 | 1,494 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2017 | 70.69 | 7,979  | 872   | 1,002 | 1,466 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2018 | 71.3  | 13,429 | 958   | 1,100 | 2,043 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2019 | 72.03 | 13,968 | 1,034 | 1,399 | 1,465 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2020 | 72.09 | 17,391 | 2,027 | 1,899 | 2,971 |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2021 | 72.45 | 13,235 | 933   | 3,166 | 4     |
| Provinsi Jawa Barat    | 10 | 2022 | 73.12 | 7,623  | 1,285 | 4,952 | 324   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2010 | 66.08 | 292    | 787   | 634   | 467   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2011 | 66.64 | 301    | 922   | 769   | 528   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2012 | 67.21 | 363    | 1,068 | 767   | 662   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2013 | 68.02 | 2,245  | 982   | 1,078 | 656   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2014 | 68.78 | 2,662  | 1,164 | 1,278 | 778   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2015 | 69.49 | 3,054  | 1,423 | 1,098 | 955   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2016 | 69.98 | 64     | 684   | 127   | 574   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2017 | 70.52 | 5,204  | 2,401 | 953   | 19    |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2018 | 71.12 | 6,029  | 2,315 | 1,085 | 19    |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2019 | 71.73 | 7,116  | 1,907 | 645   | 906   |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2020 | 71.87 | 12,229 | 2,732 | 1,319 | 1,730 |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2021 | 72.16 | 11,841 | 2,605 | 1,202 | 1,179 |
| Provinsi Jawa Tengah   | 11 | 2022 | 72.79 | 7,517  | 3,311 | 1,742 | 248   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2010 | 75.37 | 176    | 62    | 243   | 142   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2011 | 75.93 | 162    | 59    | 241   | 195   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2012 | 76.15 | 244    | 95    | 249   | 220   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2013 | 76.44 | 448    | 108   | 225   | 322   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2014 | 76.81 | 260    | 127   | 272   | 410   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2015 | 77.59 | 629    | 150   | 328   | 457   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2016 | 78.38 | 356    | 201   | 364   | 331   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2017 | 78.89 | 1,461  | 169   | 293   | 656   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2018 | 79.53 | 1,542  | 148   | 323   | 1,013 |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2019 | 79.99 | 1,287  | 176   | 169   | 864   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2020 | 79.97 | 2,202  | 226   | 225   | 265   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2021 | 80.22 | 2,078  | 202   | 358   | 549   |
| Provinsi DI Yogyakarta | 12 | 2022 | 80.64 | 1,991  | 219   | 533   | 67    |
| Provinsi Jawa Timur    | 13 | 2010 | 65.36 | 318    | 1,605 | 1,439 | 699   |
| Provinsi Jawa Timur    | 13 | 2011 | 66.06 | 386    | 1,694 | 1,841 | 794   |
| Provinsi Jawa Timur    | 13 | 2012 | 66.74 | 412    | 2,051 | 1,877 | 918   |
| Provinsi Jawa Timur    | 13 | 2013 | 67.55 | 2,947  | 2,403 | 2,475 | 942   |
| Provinsi Jawa Timur    | 13 | 2014 | 68.14 | 805    | 4,122 | 3,270 | 1,351 |

|                            |    |      |       |        |       |       |       |
|----------------------------|----|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2015 | 68.95 | 3,897  | 3,418 | 2,764 | 1,281 |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2016 | 69.74 | 251    | 3,344 | 1,911 | 879   |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2017 | 70.27 | 9,894  | 3,665 | 2,597 | 1,365 |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2018 | 70.77 | 9,747  | 3,530 | 2,562 | 1,416 |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2019 | 71.5  | 10,668 | 4,145 | 2,533 | 1,352 |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2020 | 71.71 | 13,388 | 4,931 | 2,022 | 1,448 |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2021 | 72.14 | 12,825 | 4,465 | 1,803 | 927   |
| Provinsi Jawa Timur        | 13 | 2022 | 72.75 | 8,601  | 5,324 | 2,573 | 406   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2010 | 61.97 | 86     | 184   | 262   | 341   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2011 | 62.35 | 477    | 175   | 255   | 294   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2012 | 63.41 | 123    | 242   | 350   | 432   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2013 | 64.3  | 788    | 290   | 421   | 485   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2014 | 64.89 | 873    | 321   | 466   | 538   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2015 | 65.59 | 964    | 367   | 467   | 659   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2016 | 65.88 | 171    | 394   | 435   | 659   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2017 | 66.26 | 1,760  | 480   | 509   | 1,079 |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2018 | 66.98 | 1,767  | 428   | 495   | 710   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2019 | 67.65 | 2,095  | 446   | 484   | 929   |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2020 | 67.66 | 2,420  | 521   | 483   | 1,293 |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2021 | 67.9  | 2,575  | 641   | 338   | 1,030 |
| Provinsi Kalimantan Barat  | 14 | 2022 | 68.63 | 1,532  | 787   | 1,017 | 373   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2010 | 65.96 | 223    | 92    | 191   | 377   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2011 | 66.38 | 310    | 130   | 175   | 279   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2012 | 66.66 | 212    | 151   | 253   | 449   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2013 | 67.41 | 615    | 258   | 347   | 552   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2014 | 67.77 | 312    | 246   | 297   | 759   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2015 | 68.53 | 710    | 301   | 360   | 731   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2016 | 69.13 | 18     | 33    | 42    | 122   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2017 | 69.79 | 1,172  | 387   | 335   | 594   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2018 | 70.42 | 1,228  | 450   | 454   | 905   |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2019 | 70.91 | 1,468  | 434   | 435   | 1,156 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2020 | 71.05 | 1,661  | 464   | 451   | 1,091 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 15 | 2021 | 71.25 | 918    | 186   | 850   | 4     |

|                             |    |      |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provinsi Kalimantan Tengah  | 15 | 2022 | 71.63 | 953   | 294   | 1,100 | 104   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2010 | 65.2  | 454   | 403   | 282   | 283   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2011 | 65.89 | 370   | 362   | 294   | 277   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2012 | 66.68 | 378   | 471   | 332   | 554   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2013 | 67.17 | 894   | 794   | 555   | 557   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2014 | 67.63 | 466   | 1,057 | 403   | 759   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2015 | 68.38 | 959   | 885   | 488   | 651   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2016 | 69.05 | 477   | 1,021 | 419   | 994   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2017 | 69.65 | 2,067 | 1,280 | 508   | 577   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2018 | 70.17 | 509   | 166   | 188   | 87    |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2019 | 70.72 | 1,459 | 1,089 | 551   | 891   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2020 | 70.91 | 2,260 | 1,121 | 551   | 799   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2021 | 71.28 | 1,080 | 968   | 368   | 664   |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 16 | 2022 | 71.84 | 1,642 | 1,053 | 1,043 | 86    |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2010 | 71.31 | 310   | 645   | 487   | 965   |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2011 | 72.02 | 328   | 637   | 617   | 1,510 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2012 | 72.62 | 583   | 766   | 916   | 2,407 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2013 | 73.21 | 1,696 | 1,422 | 1,429 | 2,056 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2014 | 73.82 | 586   | 1,048 | 889   | 1,932 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2015 | 74.17 | 1,180 | 1,078 | 797   | 1,648 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2016 | 74.59 | 1,425 | 1,096 | 721   | 1,276 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2017 | 75.12 | 1,671 | 1,113 | 646   | 904   |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2018 | 75.83 | 1,649 | 1,062 | 499   | 1,743 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2019 | 76.61 | 2,351 | 1,274 | 610   | 1,030 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2020 | 76.24 | 2,524 | 1,330 | 1,075 | 1,479 |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2021 | 76.88 | 1,058 | 151   | 1,840 | 139   |
| Provinsi Kalimantan Timur   | 17 | 2022 | 77.44 | 2,521 | 1,612 | 1,876 | 342   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2010 | 67.83 | 97    | 66    | 162   | 155   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2011 | 68.31 | 108   | 91    | 201   | 186   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2012 | 69.04 | 124   | 101   | 242   | 345   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2013 | 69.49 | 397   | 173   | 248   | 308   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2014 | 69.96 | 109   | 185   | 294   | 342   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2015 | 70.39 | 529   | 216   | 317   | 409   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2016 | 71.05 | 33    | 76    | 47    | 101   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2017 | 71.66 | 1,318 | 248   | 330   | 487   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2018 | 72.2  | 1,317 | 268   | 333   | 477   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2019 | 72.99 | 1,430 | 530   | 357   | 506   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2020 | 72.93 | 1,520 | 788   | 320   | 366   |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2021 | 73.3  | 864   | 284   | 280   | 32    |
| Provinsi Sulawesi Utara     | 18 | 2022 | 73.81 | 1,074 | 548   | 500   | 261   |
| Provinsi Sulawesi Tengah    | 19 | 2010 | 63.29 | 238   | 122   | 200   | 130   |

|                            |    |      |       |       |     |       |       |
|----------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2011 | 64.27 | 92    | 177 | 208   | 180   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2012 | 65    | 109   | 192 | 337   | 305   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2013 | 65.79 | 452   | 233 | 381   | 248   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2014 | 66.43 | 516   | 266 | 435   | 282   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2015 | 66.76 | 656   | 332 | 481   | 343   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2016 | 67.47 | 190   | 329 | 619   | 474   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2017 | 68.11 | 1,287 | 382 | 460   | 296   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2018 | 68.88 | 1,274 | 400 | 535   | 331   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2019 | 69.5  | 1,393 | 504 | 557   | 466   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2020 | 69.55 | 1,811 | 497 | 529   | 394   |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2021 | 69.79 | 502   | 72  | 543   | 69    |
| Provinsi Sulawesi Tengah   | 19 | 2022 | 70.28 | 1,591 | 513 | 831   | 223   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2010 | 66    | 692   | 290 | 285   | 262   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2011 | 66.65 | 885   | 371 | 364   | 335   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2012 | 67.26 | 1,282 | 538 | 527   | 485   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2013 | 67.92 | 1,371 | 575 | 564   | 519   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2014 | 68.49 | 1,559 | 654 | 641   | 590   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2015 | 69.15 | 1,871 | 687 | 683   | 625   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2016 | 69.76 | 108   | 328 | 587   | 585   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2017 | 70.34 | 3,868 | 614 | 852   | 637   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2018 | 70.9  | 3,950 | 676 | 748   | 608   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2019 | 71.66 | 3,969 | 811 | 732   | 696   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2020 | 71.93 | 4,557 | 764 | 837   | 1,021 |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2021 | 72.24 | 4,298 | 770 | 1,118 | 638   |
| Provinsi Sulawesi Selatan  | 20 | 2022 | 72.82 | 2,888 | 790 | 1,347 | 125   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2010 | 65.99 | 56    | 94  | 144   | 212   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2011 | 66.52 | 351   | 114 | 181   | 168   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2012 | 67.07 | 90    | 149 | 203   | 167   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2013 | 67.55 | 478   | 156 | 247   | 230   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2014 | 68.07 | 551   | 180 | 284   | 265   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2015 | 68.75 | 605   | 208 | 289   | 331   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2016 | 69.31 | 101   | 249 | 364   | 501   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2017 | 69.86 | 1,360 | 273 | 399   | 527   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2018 | 70.61 | 1,483 | 291 | 402   | 357   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2019 | 71.2  | 1,599 | 404 | 402   | 691   |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2020 | 71.45 | 1,808 | 753 | 459   | 1,457 |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2021 | 71.66 | 517   | 49  | 1,336 | 27    |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 21 | 2022 | 72.23 | 1,375 | 414 | 1,313 | 150   |
| Provinsi Bali              | 22 | 2010 | 70.1  | 114   | 98  | 225   | 92    |
| Provinsi Bali              | 22 | 2011 | 70.87 | 503   | 345 | 520   | 264   |
| Provinsi Bali              | 22 | 2012 | 71.62 | 709   | 332 | 304   | 248   |
| Provinsi Bali              | 22 | 2013 | 72.09 | 770   | 361 | 330   | 269   |

|                              |    |      |       |       |     |       |     |
|------------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Provinsi Bali                | 22 | 2014 | 72.48 | 217   | 451 | 288   | 349 |
| Provinsi Bali                | 22 | 2015 | 73.27 | 977   | 468 | 410   | 342 |
| Provinsi Bali                | 22 | 2016 | 73.65 | 3     | 4   | 7     | 2   |
| Provinsi Bali                | 22 | 2017 | 74.3  | 1,837 | 508 | 277   | 404 |
| Provinsi Bali                | 22 | 2018 | 74.77 | 1,850 | 400 | 244   | 362 |
| Provinsi Bali                | 22 | 2019 | 75.38 | 1,865 | 561 | 267   | 370 |
| Provinsi Bali                | 22 | 2020 | 75.5  | 2,175 | 548 | 53    | 705 |
| Provinsi Bali                | 22 | 2021 | 75.69 | 1,215 | 103 | 1,983 | 78  |
| Provinsi Bali                | 22 | 2022 | 76.44 | 1,988 | 566 | 1,580 | 67  |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2010 | 61.16 | 32    | 137 | 173   | 142 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2011 | 62.14 | 36    | 200 | 203   | 416 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2012 | 62.98 | 37    | 189 | 249   | 447 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2013 | 63.76 | 430   | 259 | 290   | 387 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2014 | 64.31 | 60    | 321 | 318   | 391 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2015 | 65.19 | 595   | 374 | 352   | 566 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2016 | 65.81 | 31    | 53  | 100   | 127 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2017 | 66.58 | 1,841 | 509 | 430   | 999 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2018 | 67.3  | 1,853 | 531 | 340   | 869 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2019 | 68.14 | 1,934 | 685 | 351   | 482 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2020 | 68.25 | 2,142 | 584 | 441   | 844 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2021 | 68.65 | 559   | 262 | 516   | 5   |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 23 | 2022 | 69.46 | 1,192 | 892 | 1,646 | 176 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2010 | 59.21 | 105   | 158 | 186   | 290 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2011 | 60.24 | 83    | 142 | 209   | 198 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2012 | 60.81 | 713   | 163 | 269   | 213 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2013 | 61.68 | 783   | 179 | 296   | 234 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2014 | 62.26 | 886   | 202 | 335   | 265 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2015 | 62.67 | 1,103 | 276 | 383   | 402 |

|                              |    |      |       |       |       |       |       |
|------------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2016 | 63.13 | 54    | 260   | 88    | 159   |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2017 | 63.73 | 2,181 | 252   | 440   | 391   |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2018 | 64.39 | 2,270 | 304   | 403   | 404   |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2019 | 65.23 | 2,721 | 339   | 301   | 564   |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2020 | 65.19 | 3,158 | 532   | 391   | 1,077 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2021 | 65.28 | 2,849 | 496   | 834   | 1,409 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 2022 | 65.9  | 1,770 | 455   | 1,151 | 47    |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2010 | 64.27 | 147   | 86    | 128   | 185   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2011 | 64.75 | 142   | 114   | 166   | 241   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2012 | 65.43 | 294   | 128   | 194   | 240   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2013 | 66.09 | 341   | 149   | 225   | 278   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2014 | 66.74 | 85    | 162   | 251   | 296   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2015 | 67.05 | 507   | 214   | 292   | 420   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2016 | 67.6  | 180   | 256   | 343   | 730   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2017 | 68.19 | 1,229 | 269   | 299   | 390   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2018 | 68.87 | 1,437 | 245   | 314   | 481   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2019 | 69.45 | 839   | 263   | 301   | 439   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2020 | 69.49 | 970   | 295   | 359   | 440   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2021 | 69.71 | 1,428 | 223   | 472   | 272   |
| Provinsi Maluku              | 25 | 2022 | 70.22 | 1,068 | 264   | 585   | 104   |
| Provinsi Papua               | 26 | 2010 | 54.45 | 248   | 449   | 532   | 803   |
| Provinsi Papua               | 26 | 2011 | 55.01 | 271   | 475   | 477   | 885   |
| Provinsi Papua               | 26 | 2012 | 55.55 | 292   | 579   | 508   | 847   |
| Provinsi Papua               | 26 | 2013 | 56.25 | 1,047 | 656   | 671   | 946   |
| Provinsi Papua               | 26 | 2014 | 56.75 | 1,320 | 827   | 846   | 1,193 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2015 | 57.25 | 1,570 | 953   | 842   | 1,536 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2016 | 58.05 | 2,024 | 828   | 763   | 1,744 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2017 | 59.09 | 2,477 | 703   | 683   | 1,952 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2018 | 60.06 | 3,456 | 765   | 606   | 839   |
| Provinsi Papua               | 26 | 2019 | 60.84 | 3,362 | 1,052 | 707   | 1,518 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2020 | 60.44 | 2,898 | 1,304 | 749   | 1,270 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2021 | 60.62 | 185   | 332   | 390   | 1,490 |
| Provinsi Papua               | 26 | 2022 | 61.39 | 1,423 | 595   | 3,129 | 268   |
| Provinsi Maluku Utara        | 27 | 2010 | 62.79 | 126   | 58    | 107   | 98    |
| Provinsi Maluku Utara        | 27 | 2011 | 63.19 | 21    | 66    | 118   | 112   |
| Provinsi Maluku Utara        | 27 | 2012 | 63.93 | 34    | 94    | 202   | 236   |
| Provinsi Maluku Utara        | 27 | 2013 | 64.78 | 256   | 118   | 217   | 200   |

|                          |    |      |       |       |       |       |       |
|--------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2014 | 65.18 | 273   | 127   | 231   | 214   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2015 | 65.91 | 353   | 156   | 262   | 285   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2016 | 66.63 | 530   | 167   | 273   | 331   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2017 | 67.2  | 707   | 179   | 284   | 377   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2018 | 67.76 | 761   | 195   | 245   | 334   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2019 | 68.7  | 888   | 261   | 294   | 409   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2020 | 68.49 | 922   | 391   | 301   | 829   |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2021 | 68.76 | 107   | 1,288 | 234   | 3     |
| Provinsi Maluku Utara    | 27 | 2022 | 69.47 | 680   | 312   | 768   | 96    |
| Provinsi Banten          | 28 | 2010 | 67.54 | 196   | 228   | 194   | 578   |
| Provinsi Banten          | 28 | 2011 | 68.22 | 213   | 270   | 245   | 681   |
| Provinsi Banten          | 28 | 2012 | 68.92 | 263   | 269   | 257   | 835   |
| Provinsi Banten          | 28 | 2013 | 69.47 | 1,051 | 271   | 379   | 695   |
| Provinsi Banten          | 28 | 2014 | 69.89 | 286   | 248   | 329   | 769   |
| Provinsi Banten          | 28 | 2015 | 70.27 | 1,546 | 412   | 433   | 1,164 |
| Provinsi Banten          | 28 | 2016 | 70.96 | 408   | 300   | 462   | 1,190 |
| Provinsi Banten          | 28 | 2017 | 71.42 | 3,330 | 386   | 410   | 1,081 |
| Provinsi Banten          | 28 | 2018 | 71.95 | 3,604 | 360   | 395   | 1,337 |
| Provinsi Banten          | 28 | 2019 | 72.44 | 3,922 | 596   | 524   | 1,418 |
| Provinsi Banten          | 28 | 2020 | 72.45 | 4,852 | 1,020 | 581   | 1,281 |
| Provinsi Banten          | 28 | 2021 | 72.72 | 5,051 | 1,876 | 3,683 | 382   |
| Provinsi Banten          | 28 | 2022 | 73.32 | 2,854 | 1,292 | 1,455 | 746   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2010 | 66.02 | 100   | 91    | 99    | 197   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2011 | 66.59 | 209   | 102   | 141   | 205   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2012 | 67.21 | 37    | 49    | 124   | 202   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2013 | 67.92 | 285   | 139   | 193   | 280   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2014 | 68.27 | 362   | 145   | 159   | 224   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2015 | 69.05 | 335   | 163   | 196   | 362   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2016 | 69.55 | 76    | 168   | 242   | 285   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2017 | 69.99 | 671   | 217   | 216   | 277   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2018 | 70.67 | 722   | 240   | 213   | 245   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2019 | 71.3  | 832   | 242   | 260   | 302   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2020 | 71.47 | 516   | 244   | 289   | 327   |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2021 | 71.69 | 592   | 223   | 542   | 5     |
| Provinsi Bangka Belitung | 29 | 2022 | 72.24 | 658   | 296   | 401   | 41    |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2010 | 62.65 | 48    | 22    | 103   | 86    |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2011 | 63.48 | 149   | 52    | 117   | 92    |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2012 | 64.16 | 55    | 36    | 158   | 129   |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2013 | 64.7  | 235   | 82    | 184   | 144   |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2014 | 65.17 | 84    | 85    | 209   | 203   |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2015 | 65.86 | 289   | 100   | 214   | 189   |
| Provinsi Gorontalo       | 30 | 2016 | 66.29 | 117   | 167   | 266   | 183   |

|                         |    |      |       |       |     |       |       |
|-------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| Provinsi Gorontalo      | 30 | 2017 | 67.01 | 600   | 137 | 200   | 194   |
| Provinsi Gorontalo      | 30 | 2018 | 67.71 | 620   | 123 | 212   | 249   |
| Provinsi Gorontalo      | 30 | 2019 | 68.49 | 644   | 154 | 229   | 251   |
| Provinsi Gorontalo      | 30 | 2020 | 68.68 | 730   | 171 | 218   | 249   |
| Provinsi Gorontalo      | 30 | 2021 | 69    | 374   | 102 | 178   | 15    |
| Provinsi Gorontalo      | 30 | 2022 | 69.81 | 515   | 191 | 407   | 51    |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2010 | 71.13 | 169   | 122 | 100   | 398   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2011 | 71.61 | 451   | 154 | 171   | 185   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2012 | 72.36 | 233   | 86  | 202   | 183   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2013 | 73.02 | 629   | 215 | 239   | 258   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2014 | 73.4  | 767   | 263 | 291   | 314   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2015 | 73.75 | 577   | 208 | 206   | 301   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2016 | 73.99 | 583   | 431 | 356   | 421   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2017 | 74.45 | 960   | 283 | 248   | 330   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2018 | 74.84 | 982   | 301 | 308   | 475   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2019 | 75.48 | 1,044 | 366 | 289   | 482   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2020 | 75.59 | 1,118 | 322 | 297   | 543   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2021 | 75.79 | 887   | 147 | 406   | 206   |
| Provinsi Kepulauan Riau | 31 | 2022 | 76.46 | 871   | 406 | 640   | 248   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2010 | 59.6  | 114   | 82  | 253   | 507   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2011 | 59.9  | 127   | 74  | 303   | 289   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2012 | 60.3  | 133   | 67  | 367   | 443   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2013 | 60.91 | 340   | 113 | 458   | 596   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2014 | 61.28 | 210   | 112 | 557   | 726   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2015 | 61.73 | 502   | 157 | 610   | 971   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2016 | 62.21 | 48    | 106 | 196   | 667   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2017 | 62.99 | 763   | 115 | 603   | 667   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2018 | 63.74 | 949   | 111 | 596   | 1,319 |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2019 | 64.7  | 1,006 | 246 | 714   | 1,576 |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2020 | 65.09 | 2,721 | 166 | 696   | 1,913 |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2021 | 65.26 | 448   | 186 | 2,096 | 147   |
| Provinsi Papua Barat    | 32 | 2022 | 65.89 | 728   | 218 | 2,179 | 43    |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2010 | 59.74 | 138   | 58  | 72    | 61    |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2011 | 60.63 | 166   | 70  | 87    | 74    |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2012 | 61.01 | 150   | 78  | 132   | 97    |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2013 | 61.53 | 180   | 94  | 159   | 117   |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2014 | 62.24 | 212   | 110 | 187   | 137   |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2015 | 62.96 | 261   | 136 | 217   | 209   |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2016 | 63.6  | 135   | 174 | 214   | 231   |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2017 | 64.3  | 401   | 225 | 201   | 199   |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2018 | 65.1  | 360   | 163 | 205   | 163   |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2019 | 65.73 | 441   | 156 | 222   | 167   |

|                         |    |      |       |     |     |     |     |
|-------------------------|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2020 | 66.11 | 871 | 214 | 234 | 146 |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2021 | 66.36 | 299 | 60  | 263 | 20  |
| Provinsi Sulawesi Barat | 33 | 2022 | 66.92 | 603 | 134 | 502 | 74  |

## Lampiran II. Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 21:57

Sample: 2010 2022

Periods included: 13

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 429

| Variable                | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.     |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| C                       | 33.52222    | 6.239659           | 5.372444    | 0.0000    |
| LOG(PEND)               | 1.450494    | 0.222053           | 6.532207    | 0.0000    |
| LOG(KES)                | 0.946384    | 0.360484           | 2.625315    | 0.0090    |
| LOG(EKO)                | -0.617470   | 0.386207           | -1.598808   | 0.1106    |
| LOG(PFU)                | -0.483868   | 0.191808           | -2.522669   | 0.0120    |
| Root MSE                | 3.986413    | R-squared          |             | 0.241101  |
| Mean dependent var      | 69.02478    | Adjusted R-squared |             | 0.233941  |
| S.D. dependent var      | 4.581387    | S.E. of regression |             | 4.009849  |
| Akaike info criterion   | 5.626971    | Sum squared resid  |             | 6817.448  |
| Schwarz criterion       | 5.674307    | Log likelihood     |             | -1201.985 |
| Hannan-Quinn<br>criter. | 5.645664    | F-statistic        |             | 33.67600  |
| Durbin-Watson stat      | 0.214659    | Prob(F-statistic)  |             | 0.000000  |

### Lampiran III. Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 22:00

Sample: 2010 2022

Periods included: 13

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 429

| Variable  | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C         | 24.27937    | 4.236181   | 5.731430    | 0.0000 |
| LOG(PEND) | 0.915509    | 0.091196   | 10.03895    | 0.0000 |
| LOG(KES)  | 1.125891    | 0.189527   | 5.940535    | 0.0000 |
| LOG(EKO)  | 0.182963    | 0.169756   | 1.077800    | 0.2818 |
| LOG(PFU)  | -0.571629   | 0.078788   | -7.255267   | 0.0000 |

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

|                         |          |                    |           |
|-------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Root MSE                | 1.312818 | R-squared          | 0.917695  |
| Mean dependent var      | 69.02478 | Adjusted R-squared | 0.910136  |
| S.D. dependent var      | 4.581387 | S.E. of regression | 1.373378  |
| Akaike info criterion   | 3.554724 | Sum squared resid  | 739.3780  |
| Schwarz criterion       | 3.905012 | Log likelihood     | -725.4882 |
| Hannan-Quinn<br>criter. | 3.693055 | F-statistic        | 121.4096  |
| Durbin-Watson stat      | 1.400529 | Prob(F-statistic)  | 0.000000  |

#### Lampiran IV. Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: IPM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/20/24 Time: 22:02

Sample: 2010 2022

Periods included: 13

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 429

Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable              | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.    |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| C                     | 24.60646    | 4.225534           | 5.823278    | 0.0000   |
| LOG(PEND)             | 0.923790    | 0.090829           | 10.17068    | 0.0000   |
| LOG(KES)              | 1.117875    | 0.187937           | 5.948124    | 0.0000   |
| LOG(EKO)              | 0.170559    | 0.168994           | 1.009259    | 0.3134   |
| LOG(PFU)              | -0.571907   | 0.078531           | -7.282527   | 0.0000   |
| Effects Specification |             |                    |             |          |
|                       |             |                    | S.D.        | Rho      |
| Cross-section random  |             |                    | 3.864642    | 0.8879   |
| Idiosyncratic random  |             |                    | 1.373378    | 0.1121   |
| Weighted Statistics   |             |                    |             |          |
| Root MSE              | 1.364865    | R-squared          |             | 0.570875 |
| Mean dependent var    | 6.770411    | Adjusted R-squared |             | 0.566826 |
| S.D. dependent var    | 2.085953    | S.E. of regression |             | 1.372889 |
| Sum squared resid     | 799.1657    | F-statistic        |             | 141.0142 |
| Durbin-Watson stat    | 1.297611    | Prob(F-statistic)  |             | 0.000000 |
| Unweighted Statistics |             |                    |             |          |
| R-squared             | 0.226201    | Mean dependent var |             | 69.02478 |
| Sum squared resid     | 6951.299    | Durbin-Watson stat |             | 0.149182 |

### Lampiran V. Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

Test cross-section fixed effects

| Effects Test             | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F          | 100.701344 | (32,392) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 952.993989 | 32       | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 22:07

Sample: 2010 2022

Periods included: 13

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 429

| Variable                | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.     |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| C                       | 33.52222    | 6.239659           | 5.372444    | 0.0000    |
| LOG(PEND)               | 1.450494    | 0.222053           | 6.532207    | 0.0000    |
| LOG(KES)                | 0.946384    | 0.360484           | 2.625315    | 0.0090    |
| LOG(EKO)                | -0.617470   | 0.386207           | -1.598808   | 0.1106    |
| LOG(PFU)                | -0.483868   | 0.191808           | -2.522669   | 0.0120    |
| Root MSE                | 3.986413    | R-squared          |             | 0.241101  |
| Mean dependent var      | 69.02478    | Adjusted R-squared |             | 0.233941  |
| S.D. dependent var      | 4.581387    | S.E. of regression |             | 4.009849  |
| Akaike info criterion   | 5.626971    | Sum squared resid  |             | 6817.448  |
| Schwarz criterion       | 5.674307    | Log likelihood     |             | -1201.985 |
| Hannan-Quinn<br>criter. | 5.645664    | F-statistic        |             | 33.67600  |
| Durbin-Watson stat      | 0.214659    | Prob(F-statistic)  |             | 0.000000  |

## Lampiran VI. Uji LM Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

|                      | Test Hypothesis      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Cross-section        | Time                 | Both                 |
| Breusch-Pagan        | 1933.766<br>(0.0000) | 10.88973<br>(0.0010) | 1944.655<br>(0.0000) |
| Honda                | 43.97460<br>(0.0000) | 3.299960<br>(0.0005) | 33.42816<br>(0.0000) |
| King-Wu              | 43.97460<br>(0.0000) | 3.299960<br>(0.0005) | 25.77920<br>(0.0000) |
| Standardized Honda   | 46.03273<br>(0.0000) | 4.106788<br>(0.0000) | 31.78549<br>(0.0000) |
| Standardized King-Wu | 46.03273<br>(0.0000) | 4.106788<br>(0.0000) | 24.20394<br>(0.0000) |
| Gourieroux, et al.   | --                   | --                   | 1944.655<br>(0.0000) |

### Lampiran VII. Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

| Test Summary         | Chi-Sq.<br>Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 3.697949             | 4            | 0.4484 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable  | Fixed     | Random    | Var(Diff.) | Prob.  |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| LOG(PEND) | 0.915509  | 0.923790  | 0.000067   | 0.3110 |
| LOG(KES)  | 1.125891  | 1.117875  | 0.000600   | 0.7435 |
| LOG(EKO)  | 0.182963  | 0.170559  | 0.000258   | 0.4400 |
| LOG(PFU)  | -0.571629 | -0.571907 | 0.000040   | 0.9651 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 22:10

Sample: 2010 2022

Periods included: 13

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 429

| Variable  | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C         | 24.27937    | 4.236181   | 5.731430    | 0.0000 |
| LOG(PEND) | 0.915509    | 0.091196   | 10.03895    | 0.0000 |
| LOG(KES)  | 1.125891    | 0.189527   | 5.940535    | 0.0000 |
| LOG(EKO)  | 0.182963    | 0.169756   | 1.077800    | 0.2818 |
| LOG(PFU)  | -0.571629   | 0.078788   | -7.255267   | 0.0000 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

|                         |          |                    |           |
|-------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Root MSE                | 1.312818 | R-squared          | 0.917695  |
| Mean dependent var      | 69.02478 | Adjusted R-squared | 0.910136  |
| S.D. dependent var      | 4.581387 | S.E. of regression | 1.373378  |
| Akaike info criterion   | 3.554724 | Sum squared resid  | 739.3780  |
| Schwarz criterion       | 3.905012 | Log likelihood     | -725.4882 |
| Hannan-Quinn<br>criter. | 3.693055 | F-statistic        | 121.4096  |
| Durbin-Watson stat      | 1.400529 | Prob(F-statistic)  | 0.000000  |

---



---